



Swantara

Majalah Triwulan Lemhannas RI No. 38 TAHUN X/SEPTEMBER 2021

Pandemi COVID-19 Belum Berakhir, Transisi ke Endemi Menjadi Pilihan

Seputar Kita

Reformasi Birokrasi Tidak Hanya Menyederhanakan Teknis, Tetapi juga Kerangka Berpikir

Profil Pejabat

Suroto, Bukan Saya yang Hebat Tapi Allah yang Meringankan

Opini

Optimalisasi Media Online untuk Membangun Bangsa

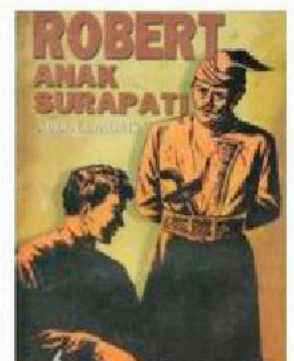
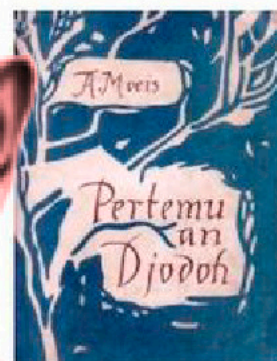
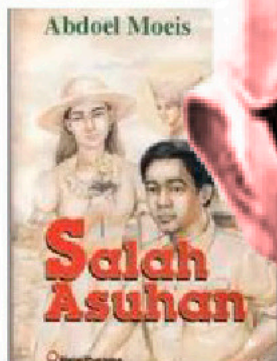
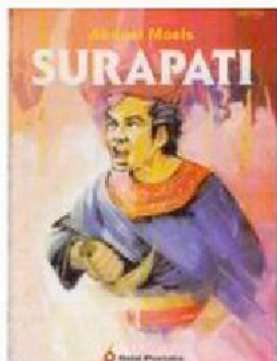
Abdul Moeis

Penyandang Gelar

Pahlawan Nasional

Pertama

- Abdul Muis adalah seorang tokoh asal Sumatra Barat yang lahir pada 3 Juli 1883. Dia merupakan seorang sastrawan, wartawan, dan nasionalis yang keras mengkritisi Belanda lewat tulisan-tulisannya.
- Dalam tulisannya di harian berbahasa Belanda De Express, Abdul Muis pernah mengecam seorang Belanda yang menghina orang Indonesia.
- Pada tahun 1917, Abdul Muis dipercaya sebagai utusan Sarekat Islam pergi ke Belanda untuk mempropagandakan komite Indie Weerbaar. Dalam kunjungan itu, ia mendorong tokoh-tokoh Belanda untuk mendirikan Technische Hooge School yang saat ini dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung.
- Pada tahun 1920, Abdul Muis terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Buruh Pegadaian. Setahun kemudian, ia memimpin pemogokan kaum buruh di Yogyakarta. Pada 1923, Abdul Muis mengunjungi Padang dan mengundang para penghulu adat untuk bermusyawarah menentang pajak yang memberatkan masyarakat Minangkabau. Karena aksinya tersebut, ia dilarang berpolitik.
- Setelah kemerdekaan, Abdul Muis dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Sukarno pada 30 Agustus 1959. Nama Abdul Muis kini diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Jakarta.





PELINDUNG AGUS WIDJOJO

PEMBINA WIEKO SYOFYAN

PENGARAH RENI MAYERNI

PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI

AGUS ARIF FADILA

REDAKTUR ALTON ENDARWANTO HADI SUSANTO

PENYUNTING/EDITOR BAMBANG IMAN ARYANTO

DESAINER GRAFIS ARINI MAULIDIA

FOTOGRAFER SUYONO

SEKRETARIAT ENDAH HELIANA, GATOT, MAULIDA

ARBANINGSIH, YUSNADI, IRMINA SRI EKOWATI

PENULIS ARTIKEL CAHYAQADRI HILDAMONA

PERMATASARI, WIA YUNIA PUTRI,

NAOMI AUGUSTINA

ALAMAT REDAKSI BIRO HUMAS LEMHANNAS RI

JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA 10110

TELP. (021) 3832108, 3832109

FAX. (021) 3451926

EMAIL : humas@lemhannas.go.id

WEBSITE : www.lemhannas.go.id

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR

LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA

SESUAI DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI

Salam Redaksi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Om Swastiastu

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya telah hadir di tengah-tengah kita, Majalah Swantara Edisi ke-38, September 2021.

Majalah Swantara masih tetap menghadirkan beberapa rubrik yang menyajikan informasi dari berbagai sudut pandang yang dapat mengedukasi bagi para pembaca, dan memberikan pesan yang sarat makna kepada para pembaca.

Edisi kali ini redaksi mengangkat Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum adanya tanda-tanda berakhir sehingga adanya pilihan untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 dalam tajuk Pandemi Covid-19 Belum Berakhir, Transisi Ke Endemi Menjadi Pilihan dalam rubrik Laporan Utama.

Selain itu, redaksi juga menyajikan informasi seputar kegiatan Lemhannas RI diantaranya Program Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Pengkajian Strategik dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Selain itu, juga ada beberapa informasi terkait dengan berbagai kegiatan Lemhannas RI lainnya.

Tak hanya itu, pada edisi kali ini tetap menghadirkan rubrik Profil Pejabat dan Pegawai, Suara Peserta, Hot News, Ragam serta Opini yang dapat menjadi pilihan sebagai referensi dan sekaligus menambah khasanah pengetahuan bagi pembaca setia Majalah Swantara.

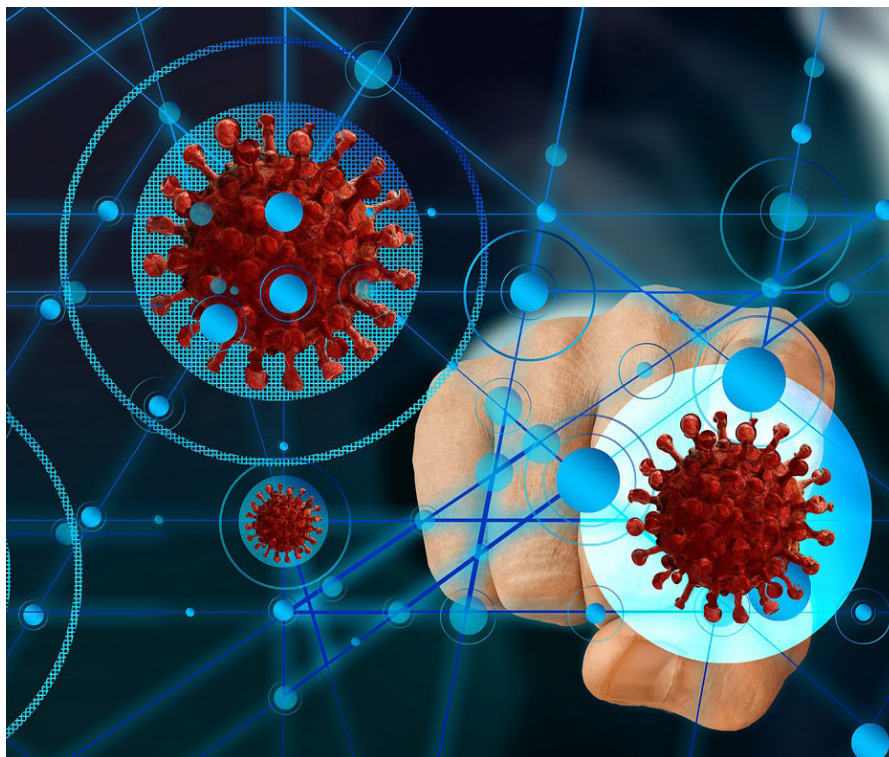
Redaksi menyadari Majalah Swantara ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, redaksi mengharapkan kritik dan masukan dari para pembaca demi eksistensi dan kemajuan karya jurnalistik yang disajikan pada edisi berikutnya.

Tak lupa redaksi menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam membantu terbitnya Majalah Swantara Edisi 38 kali ini. Semoga, Majalah Swantara selalu berkesan di hati para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Daftar Isi



6 LAPORAN UTAMA Pandemi COVID Belum Berakhir, Transisi Ke Endemi Menjadi Pilihan

SEPUTAR KITA

- 12 Tjahjo Kumolo:
Reformasi Birokrasi Tidak
Hanya Menyederhanakan
Teknis, Melainkan Mengubah
Kerangka Berpikir
- 14 Wakil Presiden Ma'ruf Amin:
Peserta PPRA Dan PPSA
Harus Menjadi Teladan
dan Panutan
- 15 Wujudkan Indonesian
Maritime 4.0, PT. PAL
Kordinasikan Galangan
Kapal Agar Berdaya Saing
- 16 Peningkatan Kualitas SDM
untuk Mewujudkan Good
Governance dan Clean
Government
- 18 Kepala BMKG dan Ketua IGI
Menjadi Narasumber dalam
Diskusi Panel PPSA 23

- 20 Diskusi Panel PPRA 62 Bahas
Penanggulangan Paham
Intoleransi, Radikalisme dan
Terorisme
- 21 Firlri Bahuri: Etika dan Integritas
adalah Poin Penting Sebagai
Pemimpin
- 22 Ketua Komnas Perempuan:
Perlu Penguatan Kapasitas
Perancang Kebijakan di Tingkat
Nasional dan Daerah
- 24 Lemhannas RI Gelar Diskusi
Jelang JGF V Tahun 2021
- 25 RTD Kajian Jangka Panjang
"Mencari Solusi Komprehensif
Bagi Penyelesaian Masalah
Papua
- 27 Indonesia Tangguh, Indonesia
Tumbuh Hanya dapat Dicapai
Jika Semua Bahu Membahu dan
Saling Bergandeng Tangan Satu
Tujuan

- 31 RTD Hilirisasi Mineral dan
Logam Tanah Jarang (LTJ)
Mendukung Pertumbuhan
Ekonomi Nasional

PROFIL PEJABAT



- 35 Marsma TNI Suroto, S.T., M.A.P.
Bukan Saya yang Hebat,
Tapi Allah yang Meringankan

PROFIL PEGAWAI

- 38 Audrey Divananda, A.P.Kb.N
Memaknai Kontribusi dan
Manfaat Diri

OPINI

- 40 Optimalisasi Media Online
untuk Membangun Bangsa
- 43 Peristiwa G30 S/PKI Dalam
Berbagai Macam Sudut
Pandang (Analisa Teori
Dalang)

HOT NEWS

- 46 Pandemi COVID-19 dan
PPKM
- 47 Eks Pejabat Afghanistan:
Taliban Butuh Bantuan
Ekonomi dari China

RAGAM

- 48 Warna Paling Dominan di
Alam Semesta, dari Biru
Toska Hingga Krem
- 49 Sentuhan Milenial
Memviralkan Pariwisata

SUARA PESERTA

- 50 Lemhannas RI adalah Tempat
Terbaik untuk Belajar dan
Mengembangkan Kedisiplinan,
Keilmuan kejujuran dan
Semangat Nasionalisme

Aplikasi PeduliLindungi Perluas Pemanfaatannya

Aplikasi PeduliLindungi menjadi penting keberadaannya selama masa PPKM ini, dalam perkembangan awalnya yang hanya digunakan untuk pelacakan kasus COVID-19 kini pemanfaatannya diperluas.

1. Akses Sertifikat Vaksinasi COVID-19

Sertifikat vaksin dapat diakses setelah melakukan vaksinasi penuh. Berisikan informasi pribadi, tanggal dan tempat vaksinasi dilakukan.

2. Pelacakan Penyebaran COVID-19

Aplikasi ini berfungsi untuk membantu pemerintah melacak penyebaran COVID-19 di suatu wilayah atau secara keseluruhan. Caranya pengguna dapat mengaktifkan fitur lokasi di handphone.

3. Informasi Zonasi

Aplikasi ini dapat menunjukkan indikator warna sesuai lokasi yang dipilih, terdapat warna merah, kuning dan hijau.

4. Pemeriksaan Kesehatan

Terdapat fitur teledokter apabila pengguna memerlukan bantuan tenaga kesehatan, misalnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mandiri dan juga konsultasi terkait kondisi kesehatan yang dialami

5. Syarat Masuk Fasilitas Umum

Pengunjung harus memiliki aplikasi PeduliLindungi dan melakukan scan barcode pada fasilitas-fasilitas umum yang menggunakan syarat ini. Seperti pusat perbelanjaan dan moda transportasi.

Sumber data: suara.com

Pandemi Covid-19 Belum Berakhir, Transisi Ke Endemi Menjadi Pilihan

Pandemi Covid-19 belum berakhir. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melihat pandemi akan berakhir setidaknya hingga satu tahun lagi ketika dunia telah mencapai target vaksinasi global dan kekebalan komunitas.

Foto.
pixabay.com

Pandemi Covid-19 belum berakhir. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melihat pandemi akan berakhir setidaknya hingga satu tahun lagi ketika dunia telah mencapai target vaksinasi global dan kekebalan komunitas.

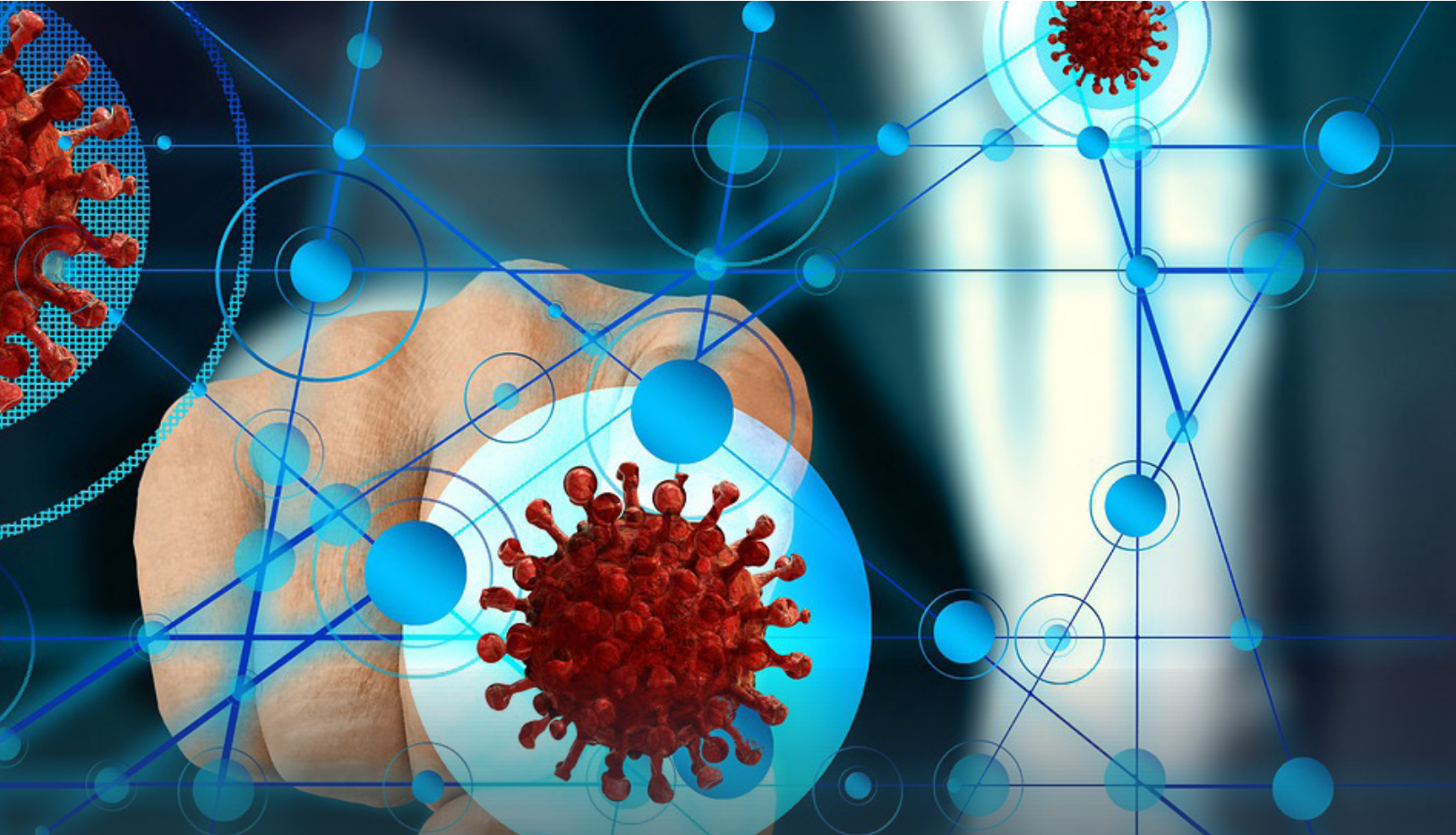
WHO menganggap keberhasilan pengembangan vaksin diyakini jadi kunci untuk mengakhiri kematian dan kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang ditetapkan sebagai pandemi pada Maret tahun lalu.

Kekecewaan yang ekstrem, diungkap WHO, karena adanya kegagalan negara-negara kaya membantu vaksinasi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Menurut kepala WHO, hal tersebut dapat memperpanjang pandemi.

Direktur Jenderal WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Rabu (21/7), telah mengumumkan target vaksinasi global untuk memvaksinasi setidaknya 10 persen dari populasi setiap negara pada September.

Ghebreyesus berharap mencapai 40 persen vaksinasi global pada akhir tahun dan kemudian 70 persen pada pertengahan 2022.

“Ini adalah tonggak penting yang harus kita capai bersama untuk mengakhiri



pandemi. Ini akan berakhir ketika dunia memilih untuk mengakhirinya, karena solusinya ada di tangan kita “ kata Ghebreyesus.

Namun hingga saat ini yang menjadi permasalahan baru lebih dari 2 miliar orang telah divaksinasi Covid-19. Jumlah itu hanya sekitar seperempat dari populasi dunia, jauh di bawah target vaksinasi global 70 persen, yang dibutuhkan untuk mencapai kekebalan komunitas.

Ghebreyesus pun mengungkapkan rasa frustrasinya, karena sebagian besar dari vaksin Covid-19 hanya menjangkau beberapa negara. Dia menyebut ada ketidakadilan vaksin sebagai “kegagalan moral” dan “merusak secara epidemiologis dan ekonomis”.

Pakar kesehatan telah menunjukkan bahwa tingkat vaksinasi yang rendah di wilayah tertentu di dunia memungkinkan virus menyebar, dan meningkatkan kemungkinan pembentukan mutasi baru. Meski vaksin yang ada masih efektif melawan mutasi saat ini, semakin banyak mutasi yang muncul maka virus bisa lolos dari kekebalan vaksin.

Jika itu terjadi, Ghebreyesus memperingatkan bahwa vaksin baru

harus dikembangkan dan seluruh dunia harus divaksin ulang. Adapun untuk mencapai target vaksinasi global, 70 persen dari populasi setiap negara diperlukan sekitar 11 miliar dosis vaksin Covid-19, menurut Ghebreyesus melansir Newsweek pada Sabtu (24/7).

Untuk segera mengisi kesenjangan pasokan vaksin Covid-19, Ghebreyesus mengatakan negara-negara kaya perlu mulai berbagi dosis daripada menimbun jika diperlukan dosis booster. Namun itu hanya solusi jangka pendek.

Menurutnya, dunia perlu “secara dramatis” meningkatkan jumlah vaksin yang sedang diproduksi untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah.

“Ada banyak penyakit yang membuat kita kekurangan vaksin, tes yang baik, dan perawatan yang efektif. Tidak demikian untuk Covid-19. Kita memiliki semua alat yang dibutuhkan. Itu berarti mengakhiri pandemi pada dasarnya bukanlah ujian penemuan ilmiah, kekuatan finansial, atau kecakapan industri; ini adalah ujian karakter,” kata Ghebreyesus.

Pandemi di Indonesia

Di Indonesia sendiri, sejak mewabahnya pandemi Covid-19 hingga ditetapkannya

sebagai bencana nasional non alam di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pandemi Covid-19. Mulai pemberlakuan protokol kesehatan, melakukan 3 T (Testing, Tracing dan Treatment), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga saat ini masih diberlakukan.

Perkembangan penanganan pandemi COVID-19 per 18 September 2021 secara nasional, angka kesembuhan harian bertambah mencapai 7.076 orang sembuh per hari. Adanya penambahan hari ini meningkatkan angka kumulatif kesembuhan hingga menembus angka 3,9 juta orang sembuh atau tepatnya 3.983.140 orang (95,1%).

Sejalan dengan itu, kasus aktif atau pasien positif yang masih membutuhkan perawatan medis, berkurang lagi sebanyak 3.876 kasus dan totalnya menurun menjadi 65.066 kasus (1,6%). Pada penambahan pasien terkonfirmasi positif (RT-PCR/TCM dan rapid antigen), hari ini bertambah sebanyak 3.385 kasus dan kumulatifnya, atau jumlah pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus pertama hingga hari ini mencapai 4.188.529 kasus.



SITUASI COVID-19 DI INDONESIA

Update 18 September 2021

JUMLAH TERPAPAR COVID-19

4.188.529
KONFIRMASI

3.983.140
SEMBUH

276.094
SPESIMEN

364.144
SUSPEK

65.066
KASUS AKTIF

140.323
MENINGGAL

DATA VAKSINASI COVID-19

78.540.519
VAKSINASI KE-1

44.716.570
VAKSINASI KE-2

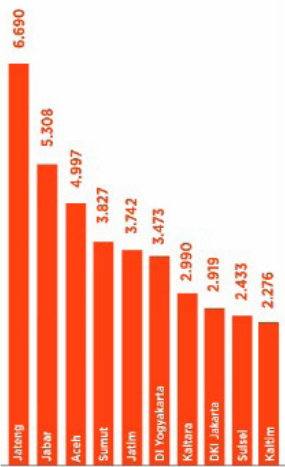
838.878
VAKSINASI KE-3

208.265.720

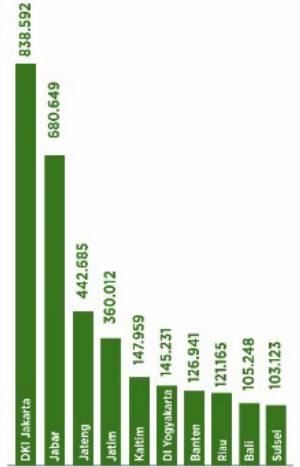
TARGET SASARAN VAKSINASI NASIONAL

10 PROVINSI DENGAN ANGKA TERTINGGI

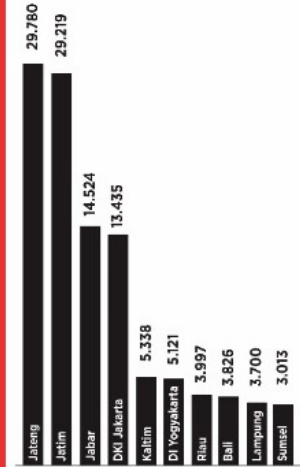
Kasus Aktif



Kumulatif Kasus Sembuh



Kumulatif Kasus Meninggal



Kementerian Komunikasi dan Informatika - RI

Sumber : kemkes.go.id dan covid19.go.id | Info COVID-19 : covid19.go.id | sid/infovaksin (KPCPEN)

Disamping itu, pasien meninggal juga bertambah lagi sebanyak 185 kasus dan kumulatifnya mencapai 140.323 kasus (3,4%). Selain itu, dari hasil uji laboratorium per hari, spesimen selesai diperiksa (RT-PCR/TCM dan rapid test antigen) per hari sebanyak 276.094 spesimen dengan jumlah suspek sebanyak 364.144 kasus.

Disisi lain pemerintah juga telah melakukan program vaksinasi Covid-19 pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity sejak Januari 2021 lalu. Ada empat tahap dalam pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan, tahap pertama menasar tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Tahap kedua vaksinasi Covid-19 ditujukan kepada Kelompok usia lanjut (60 Tahun) dan petugas pelayanan publik (TNI/Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain) yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tahap ketiga dan keempat vaksinasi Covid-19 menasar masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi serta masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Hingga 18 September 2021, perkembangan program vaksinasi, penerima vaksin ke-1 terus bertambah dan hari ini sebanyak 1.123.031 orang dengan totalnya melebihi 78 juta orang atau 78.540.519 orang. Sedangkan yang menerima vaksinasi ke-2 juga meningkat melebihi 44 juta orang atau angka tepatnya 44.716.570 orang termasuk tambahan hari ini sebanyak 591.855 orang. Serta penerima vaksin ke-3 bertambah sebanyak 4.340 orang dan kumulatifnya sebanyak 838.878 orang. Untuk target sasaran vaksinasi berada di angka 208.265.720 orang.

Presiden Joko Widodo ketika meninjau vaksinasi Covid-19 di SLB (Sekolah Luar Biasa) Negeri 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Jumat (10/9), menyebut bahwa percepatan dan perluasan vaksinasi penting dilakukan sehingga target masyarakat yang telah menerima vaksinasi lebih 70% pada akhir tahun 2021 mendatang. “Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang sudah antusias untuk vaksinasi,” jelasnya.

Namun Presiden tetap mengingatkan agar masyarakat tidak euforia berlebihan dan abai akan protokol kesehatan utamanya memakai masker. “Ini penting saya sampaikan agar kita tidak euforia yang berlebihan, senang-senang yang berlebihan, karena kita semuanya, masyarakat harus sadar bahwa Covid selalu mengintip kita sehingga protokol kesehatan harus terus dilakukan terutama memakai masker,” jelas Presiden.

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa penerapan protokol kesehatan secara ketat dan vaksinasi merupakan cara terbaik dalam melindungi diri dari penyebaran Covid-19. “Cara yang terbaik adalah melindungi diri dengan vaksinasi dan juga melaksanakan protokol kesehatan secara ketat,” katanya.

Sementara dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), hingga Hingga 10 September 2021 realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021 telah mencapai Rp377,5 triliun atau 50,7% dari pagu Rp744,77 triliun.

Progres signifikan terjadi pada realisasi Klaster Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Klaster Kesehatan. Realisasi Klaster Kesehatan meningkat dari Rp47,71 triliun di Kuartal II menjadi Rp93,45 triliun, sedangkan Klaster Perlinsos meningkat dari Rp66,43 triliun di Kuartal II menjadi Rp108,16 triliun. Pada Kuartal III 2021, realisasi Program Prioritas mencapai Rp58,04 triliun, Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi mencapai Rp59,93 triliun, dan Insentif Usaha mencapai Rp57,92 triliun.

Terakhir Pada 9 September 2021 lalu, pemerintah meluncurkan program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW). Bantuan sebesar Rp1,2 juta ini ditujukan untuk 1 juta pelaku usaha mikro, terutama pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung di kabupaten/kota PPKM Level 4 dan belum pernah menerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). BTPKLW diharapkan menjadi bantalan bagi PKL dan pemilik warung yang terdampak penerapan PPKM Level 4, juga sinyal untuk menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah.

Berdampingan dengan Covid-19

Meski dengan strategi penerapan PPKM yang dilakukan pemerintah, namun epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengingatkan masa krisis pandemi Covid-19 belum berakhir. “Pandemi ini berpotensi paling cepat dicabut akhir tahun depan. Itu potensi yang optimistis,” ujarnya saat mengisi konferensi virtual bertema Waspada! Masa Krisis Pandemi Covid-19 Belum Berakhir, pada Selasa (14/9). Ia meminta masyarakat harus hidup berdampingan dengan Covid-19.

Artinya bisa hidup bersama dengan tidak mengganggu kesehatan publik atau sektor vital dalam satu negara. Karena menurut Dicky, menghadapi Covid-19 sama seperti menghadapi penyakit lain yang bisa ditanggulangi. Ia menegaskan, pengendalian Covid-19 penting dilakukan karena kini dunia termasuk Indonesia menghadapi mutasi virus seperti varian Mu hingga varian Delta. “Jika dulu virus tidak bermutasi dan stabil dalam lima tahun tetapi sekarang varian baru Covid-19 muncul setiap pekan. Tetapi varian baru itu tidak selalu merugikan manusia, bahkan kadang bisa merugikan si virus itu sendiri,” katanya.

Saat ini Dicky melihat upaya pemerintah yang terus memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan laju penularan kasus Covid-19 sebagai strategi yang tepat. “PPKM level tinggi

adalah satu strategi yang sudah tepat. Karena sejarah pandemi di masa modern memang harus seperti itu, strateginya bergradasi,” katanya.

Sementara, Presiden RI Joko Widodo sendiri menegaskan bahwa Covid-19 tidak akan hilang dalam waktu dekat, maka dari itu masyarakat harus siap dengan pilihan hidup berdampingan dengan Covid-19. Joko Widodo mengatakan akan memulai proses transisi dari pandemi ke endemi. “Kita harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi dan juga mulai belajar hidup bersama dengan Covid,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI, hidup berdampingan dengan virus Corona dengan mengupayakan pergeseran dari pandemi ke endemi layak ditanggapi sebagai ajakan memulai pemulihan semua aspek kehidupan secara bertahap. Agar pergeseran ke endemi bisa segera diwujudkan, kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan (Prokes) masih dan tetap menjadi faktor kunci.

Pandemi Covid-19 memang belum berakhir. Tetapi masyarakat Indonesia patut bersyukur karena berbagai upaya dan kerja keras yang dilakukan semua komunitas di bulan-bulan terdahulu telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Kendati penularan Covid-19 masih menjadi ancaman nyata, hasil dari kesungguhan kerja keras itu berbuah proses.

Pencapaian progres yang signifikan dalam menangani pasien dan mengendalikan kecepatan penularan Covid-19 itu mencerminkan kehendak dan semangat semua elemen masyarakat yang sungguh-sungguh bekerja ekstra keras untuk mengakhiri krisis kesehatan yang sudah memasuki tahun kedua ini. Semua orang tahu dan mencatat bahwa pencapaian progres yang signifikan itu bukanlah pekerjaan mudah.

Karena itu, menurut Bambang Soesatyo mengapresiasi dan memberikan penghormatan setinggi-tingginya layak diberikan kepada komunitas dokter,

semua tenaga kesehatan (Nakes), para relawan serta unsur TNI-Polri yang tak kenal lelah, dan dengan gagah berani berada di garda terdepan dalam ‘perang’ melawan penularan Covid-19. Penghargaan dan hormat layak pula diberikan kepada pemerintah karena juga telah bekerja ekstra keras sehingga berhasil mendatangkan lebih dari 200 juta dosis vaksin corona.

“Dari hasil kerja keras itulah, cukup alasan bagi masyarakat Indonesia segera bersiap untuk bergeser dari pandemi ke endemi. Namun, dengan bergeser ke endemi, siapa pun tidak boleh berasumsi bahwa penularan wabah Covid-19 telah berakhir. Sebaliknya, dengan bergeser ke endemi, masyarakat juga diingatkan untuk selalu menyadari bahwa dengan pergeseran itu berarti semua orang sedang hidup berdampingan dengan virus corona yang gampang menular itu. Fakta inilah yang patut digarisbawahi oleh semua orang dan semua keluarga. Konsekuensinya, kepatuhan pada Prokes tetap tidak bisa ditawar, utamanya saat berkegiatan di luar rumah atau di ruang publik,” jelas Bambang Soesatyo.

Transisi Pandemi ke Endemi dalam Perspektif Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional sendiri merupakan keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Pada Forum Komunikasi Lemhannas RI dengan Pemimpin Redaksi Media Massa pada November 2020 lalu, Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A. dalam paparannya, mengatakan bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya menginfeksi manusia dari aspek kesehatan, tetapi juga menginfeksi ketahanan nasional sehingga terjadinya penurunan indeks ketahanan nasional.

Menurut Dadan, penurunan tersebut berawal dari terpengaruhnya gatra demografi yang kemudian juga memengaruhi pada gatra politik, sosial budaya dan gatra lainnya. Labkurtannya mengidentifikasi ada beberapa variabel dalam gatra demografi yang menurun, yakni fertilitas, morbiditas dan mobilitas yang diakibatkan pandemi Covid-19. Dengan dibatasinya gerakan manusia saat pandemi, mengakibatkan aktivitas ekonomi yang stagnan sehingga terjadinya resesi ekonomi dan dapat memengaruhi gatra-gatra yang ada pada konsep ketahanan nasional.

Sementara Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo sendiri mengatakan bahwa untuk membangun ketahanan nasional bisa melalui pendekatan gatra yang terdiri dari gatra ideologi, gatra ekonomi, gatra politik, gatra sosial dan budaya, serta gatra pertahanan dan keamanan. Kondisi masing-masing gatra tersebut memengaruhi ketahanan nasional. Apabila salah satunya lemah maka akan mempengaruhi kondisi ketahanan nasional.

“Ketahanan itu bukan perlawanan, ketahanan itu pemulihan,” ujar Agus Widjojo. Menurutnya, ketahanan hanya bisa diukur setelah menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ketahanan, lanjut Agus, penekanannya diberikan pada kemampuan mempertahankan kelangsungan hidup (Survivability), kemampuan beradaptasi (Adaptability), kemampuan pemulihan kembali (Bounce Back), dan kemampuan pengembangan dalam menghadapi situasi disruptif (Recovery).

Oleh karena itu, dalam menghadapi sebuah pilihan yaitu transisi pandemi ke endemi, maka perlu melihat ketahanan pada tingkat nasional yang dilihat sebagai kemampuan masyarakat untuk menghadapi keadaan sulit dengan melakukan perubahan dan penyesuaian serta menyerap kesulitan atau perubahan yang diakibatkan oleh ancaman. Ditinjau dari transisi pandemi ke endemi, maka masyarakat harus mampu

bertahan hidup dalam berdampingan dengan Covid-19 dengan melakukan penyesuaian dalam cara baru dan inovatif.

Dalam konteks ketahanan nasional, cara baru dan inovatif untuk menghadapi transisi pandemi ke endemi perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Selain dengan vaksinasi Covid-19, juga tetap menjaga protokol kesehatan dengan mengedepankan pola hidup sehat dalam tatanan normal baru. Berharap pemerintah dan masyarakat dapat bersatu dan berupaya yang terbaik, tidak hanya dalam mengatasi pandemi Covid-19 tetapi dapat hidup berdampingan dengan Covid-19.

Sumber: Berbagai sumber, diolah Redaksi

apa itu endemi?

Penyakit yang biasanya mewabah di suatu wilayah tertentu

Mengacu pada kehadiran suatu wabah penyakit terus menerus

Wabah penyakit yang secara konsisten ada, tetapi terbatas pada wilayah tertentu



Penyebaran penyakit dan tingkat penularan dapat diprediksi

Virus tidak akan hilang sepenuhnya, hanya saja sudah lebih terkendali

Indikator Pandemi Bisa Jadi Endemi

Meningkatnya kekebalan masyarakat melawan virus

Menurunnya angka infeksi alamiah sehingga jumlah pasien dan angka kematian akibat virus menurun

Bersiap Melalui Transisi

Pemerintah mengatakan akan memulai proses transisi dari pandemi ke endemi karena COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu dekat

Sumber data: IndonesiaBaik.id

"Kita harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi dan juga mulai belajar hidup bersama dengan covid."

Presiden Joko Widodo



Tjahjo Kumolo: Reformasi Birokrasi Tidak Hanya Menyederhanakan Teknis, Melainkan Mengubah Kerangka Berpikir

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) H. Tjahjo Kumolo, S.H. memberikan kuliah umum kepada para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 pada Jumat (2/7), secara daring.

Dalam kuliah umum tersebut, Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Menurutnya, permasalahan tersebut

mengerucut dalam empat hal dan harus mendapatkan perhatian penuh dari seluruh stakeholder. Pertama, masalah yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme yang dinilainya menjadi hal yang sangat membahayakan. Kedua, masalah yang berkaitan dengan masalah narkoba dimana memberikan ancaman kepada generasi penerus bangsa.

Tantangan yang ketiga adalah korupsi. Menurut Tjahjo Kumolo, hal-hal seperti perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, serta jual beli jabatan adalah area rawan korupsi. “Ini area

rawan korupsi yang menjadi fokus KPK, fokus Kepolisian, dan fokus Kejaksaan untuk menyelesaikan masalah-masalah tantangan ini,” ujarnya.

Kemudian tantangan keempat menurut Tjahjo Kumolo adalah bencana alam. Tidak bisa dipungkiri, menurutnya Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana alam. Setiap saat bisa muncul bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tsunami, bahkan saat ini ditambah dengan adanya pandemi Covid-19.

Dengan adanya tantangan-tantangan



Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) H. Tjahjo Kumolo, S.H. memberikan kuliah umum kepada para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23

di atas, pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan harus terus berbenah. Pembenaan yang melibatkan berbagai sektor di dalam unsur pemerintahan. “Pada prinsipnya reformasi birokrasi tidak hanya menyederhanakan secara teknis, melainkan mengubah kerangka berpikir untuk meningkatkan kinerja pemerintah,” ungkap Tjahjo Kumolo.

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk membangun birokrasi yang lebih lincah, semakin profesional, serta efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan publik. Reformasi birokrasi juga diharapkan mampu untuk menggerakkan dan mengorganisir masyarakat untuk lebih percaya dan puas terhadap kinerja pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan percepatan reformasi birokrasi di berbagai instansi

daerah maupun pusat terutama pada implementasi sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tjahjo Kumolo berharap penyelenggaraan PPSA dan PPRA oleh Lemhannas RI mampu menjadi salah satu titik penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena menurutnya, selama program pendidikan, para peserta dibentuk untuk menjadi pemimpin tingkat nasional yang berjiwa besar, mampu menerima saran dan kritik dari berbagai pihak, tidak pernah berhenti untuk inovasi, dan bisa memahami persoalan serta memberikan evaluasi atas suatu keadaan yang lebih komprehensif.

Para peserta juga diminta untuk bisa memberikan orientasi bagi seluruh komponen organisasi, mampu merangkul semua unsur kebangsaan, dan mempunyai ketegasan dalam

mengambil sebuah keputusan strategik. “Perubahan cepat dunia harus diiringi oleh adaptasi tepat dan pengembangan yang berkelanjutan. Kepemimpinan aparatur negara harus mampu mengimbangi segala tantangan disruptif melalui perubahan dasar pada sistem dan manusia yang relevan dengan zaman,” ujar Tjahjo Kumolo.

Dalam kesempatan tersebut Tjahjo Kumolo juga menyampaikan bahwa semua peserta PPRA 62 dan PPSA 23 akan memberikan banyak manfaat dalam menemukan digital talent dan digital leader baru yang akan menjadi lini terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebuah langkah untuk terciptanya birokrasi kelas dunia yang menjadi tujuan utama reformasi birokrasi.

KULIAH UMUM PPRA 62 & PPSA 23



Wakil Presiden Ma'ruf Amin: Peserta PPRA 62 dan PPSA 23 Harus Menjadi Teladan dan Panutan

Seluruh Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 Lemhannas RI menerima pembekalan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, pada Selasa (6/7) secara daring.

Pada kesempatan tersebut, Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 telah mendisrupsi cara hidup individu, masyarakat, dan bangsa. Pandemi kali ini memberikan pelajaran kepada manusia untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dari kehidupan business as usual menuju tatanan dan cara hidup baru.

Dalam mengatasi masalah dan dampak pandemi Covid-19, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan. Beberapa diantaranya seperti memfokuskan dan memprioritaskan APBN untuk sektor kesehatan, bantuan sosial, dan stimulus bagi dunia usaha termasuk UMKM. "Pemerintah pada prinsipnya selalu menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, di samping menjaga ketahanan ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19," ujar Ma'ruf Amin.

Hal penting lainnya yang disampaikan oleh Ma'ruf Amin adalah tentang prioritas nasional dalam mencapai Indonesia Maju. Hal tersebut bisa dicapai dengan membangun sumber daya manusia unggul, yakni SDM yang sehat, cerdas, berdaya saing, produktif, berakhlak mulia, dan setia kepada NKRI. Sumber daya manusia yang unggul menjadi penentu keberhasilan dalam mewujudkan kemajuan dan kemandirian ekonomi, serta kesejahteraan

masyarakat, bangsa, dan negara. "SDM Indonesia harus dipersiapkan untuk mampu bersaing dan cepat beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi informasi yang mendisrupsi segala bidang," ujar Ma'ruf Amin.

Tidak bisa dipungkiri bahwa membangun SDM unggul dalam kondisi pandemi Covid-19 adalah sebuah tantangan bagi setiap penyelenggara pendidikan. Sistem pembelajaran yang semula dilaksanakan secara tatap muka, saat ini belum memungkinkan untuk dilakukan, sehingga harus dilakukan secara daring. Pelaksanaan kelas daring jelas memiliki kekurangan, yang mana para peserta pendidikan akan kesulitan dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan rekan sejawat maupun tenaga pendidiknya. Terlebih ada beberapa mata pelajaran yang sulit disampaikan oleh pendidik karena harus dipraktikkan secara langsung.

"Pendidikan bukan sekedar mentransmisi pengetahuan, akan tetapi harus dipastikan bagaimana suatu pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Peran guru, dosen, dan interaksi yang terjadi dengan peserta didik, sejatinya tidak dapat digantikan oleh teknologi. Pendidikan bukan hanya bagaimana pengetahuan didapatkan, akan tetapi bagaimana suatu nilai, kerja sama, serta kompetensi dapat ditransformasikan," tutur Ma'ruf Amin.

Oleh karena itu, Ma'ruf Amin dengan tegas menyampaikan bahwa keberhasilan proses belajar dan mengajar membutuhkan kerja sama yang baik dari seluruh pihak, baik pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, media massa, hingga orang tua siswa.

Dalam era digital yang sangat menantang dan kompetitif, pendidikan harus mampu menjadi katalis dan pusat inovasi. Berbagai fakta menunjukkan bahwa inovasi memberikan kontribusi besar ke pembangunan sebuah negara. Laporan Global Innovation Index (GII) 2020 memperlihatkan negara-negara dengan skor inovasi yang tinggi memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang lebih tinggi pula. Dalam data GII 2020 tersebut, Indonesia berada di posisi 85 dari 131 negara di dunia. Pada tingkat ASEAN, peringkat inovasi Indonesia masih tertinggal oleh Singapura dan Malaysia.

Mengakhiri pembekalan tersebut, Ma'ruf Amin menyampaikan harapannya kepada peserta PPRA 62 dan PPSA 23 yang akan menjadi negarawan-negarawan yang handal, berwawasan luas, berintegritas tinggi kepada bangsa dan NKRI, serta dapat berkontribusi nyata kepada negara dan bangsa. "Peserta PPRA 62 dan PPSA 23 harus menjadi teladan dan panutan yang mampu mendorong terciptanya tatanan kehidupan nasional berdasarkan kehidupan demokrasi yang sehat, beretika, bermoral dan bebas KKN, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang telah kita sepakati bersama," tutup Ma'ruf Amin.

Kuliah umum tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan, Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P., dan sejumlah pejabat Lemhannas RI dan undangan dari kementerian/lembaga secara daring.

Wujudkan Indonesian Maritime 4.0, PT PAL Koordinasikan Galangan Kapal Agar Berdaya Saing

Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero), Dr. Kaharuddin Djenod M.Eng memberikan ceramah kepada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23, pada Kamis (8/7) secara daring. Mengawali ceramahnya, Kaharuddin Djenod menyampaikan Peran PT PAL Indonesia (Persero) dalam Pembangunan Nasional.

Kemudian selanjutnya, Kaharuddin Djenod menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia yang diiringi dengan potensi ekonomi maritim yang berada pada 11 sektor seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan perikanan dan hasil laut, industri bioteknologi kelautan, ESDM, pariwisata bahari, perhubungan laut, kehutanan, sumber daya wilayah pulau pulau kecil, industri dan jasa maritim, serta SDA non konvensional. Nilai ekonomi dari 11 sektor tersebut, diperkirakan kurang

lebih sebesar USD 1,3 triliun per tahun dengan potensi lapangan kerja sekitar 45 juta orang atau 35% dari total angkatan kerja.

Salah satu bentuk pemanfaatan potensi di sektor maritim adalah pengoptimalan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Namun, Kaharuddin Djenod menyayangkan bahwa sampai saat ini, ALKI yang memiliki 9 corong yang masih dianggap perlu adanya peningkatan pengelolaan sistem pertahanan dan keamanannya. “Sembilan corong ALKI ini sampai sekarang masih sangat mudah ditembus. Kita belum memiliki sistem pertahanan keamanan yang mampu menjaga sembilan corong ALKI,” ujar Kaharuddin.

Dari ketiga ALKI yang ada (I,II, dan III), ALKI III (Laut Arafuru, Laut Sawu, Selat Ombai, Samudera Pasifik, Laut Banda-Laut Seram, Laut Maluku dan Laut Banda) dinilainya sebagai wilayah yang membutuhkan perhatian khusus, karena letaknya jauh dari pusat komando. Perairan ALKI III sangat panjang dan berliku, melewati gugusan besar dan kecil, dengan berbagai masalah dan potensi ancamannya.

Saat ini PT PAL (Persero) sebagai BUMN Industri Pertahanan di bidang matra laut, sedang melakukan transformasi untuk beradaptasi dengan perkembangan industri maritim dunia. Transformasi dimulai dengan mengimplementasikan sistem industri 4.0 yang disebut dengan Indonesian Maritime 4.0. Sistem tersebut mengedepankan unsur digitalisasi, sehingga kontrol di seluruh titik produksi, mulai dari personel hingga mesin dapat dipantau secara menyeluruh dan real time.

“Dengan penerapan Indonesian Maritime 4.0 diharapkan proses produksi PT PAL (Persero) dari jam per jam dari menit-per menit itu terkontrol secara keseluruhan,” ungkap Kaharuddin Djenod. Kelak sistem tersebut akan digabungkan dengan sistem optimasi yang sudah dirancang, sehingga menghasilkan proses produksi yang jauh lebih optimal.

Demi mewujudkan Indonesian Maritime 4.0, PT PAL (Persero) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam hal tersebut, BRIN akan mendukung melalui tenaga-tenaga dari dalam negeri maupun luar negeri untuk bersama-sama membangun industri maritim.

“PT PAL juga akan mengkoordinir hampir seluruh galangan-galangan kapal di Indonesia untuk menerapkan sistem yang sama sehingga harapannya galangan-galangan kapal di Indonesia itu bukan hanya menjadi jago di kandang sendiri. Harapannya, dengan sistem seperti ini mereka akan mampu bersaing di luar negeri,” kata Kaharuddin.



Peningkatan Kualitas SDM untuk Mewujudkan Good Governance dan Clean Government

sebenarnya tujuan globalnya, tujuan akhirnya, tujuan komprehensifnya adalah mutu pelayanan itu akan kita capai,” ungkapnya.

Daeng Mohammad Faqih menyebutkan bahwa ada dua variabel yang mempengaruhi pelayanan kesehatan, yakni Variabel Objektif dan Variabel Subjektif. Ketua PB IDI sejak 2018 ini menyatakan bahwa dalam Variabel Objektif yang perlu dikerjakan yakni memaksimalkan Tatalaksana Klinis atau Medis sesuai kompetensi dan kewenangan masing-masing petugas pelaksana pelayanan.

Sedangkan dalam Variabel Subjektif, adalah tentang kehandalan, kecepatan, dan ketanggapan SDM yang bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan ketika menghadapi berbagai masalah saat

pelaksanaan pelayanan kesehatan. Tidak bisa dipungkiri, masalah kecepatan dan ketanggapan ini, masih menjadi kendala dalam berbagai bentuk pelayanan kesehatan yang ada saat ini. Namun Daeng Mohammad Faqih menjamin bahwa semua pemangku kebijakan di bidang pelayanan kesehatan akan terus berbenah untuk mencapai pelayanan yang optimal.

Kemudian kesempatan berikutnya, Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, Asean Eng. menjelaskan bahwa saat ini ekonomi dunia bergeser dari “barat” ke “timur”. Hal ini menandakan bahwa pada abad ke-21 Asia berkesempatan untuk memimpin perkembangan dunia. Indonesia sebagai negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang jumlahnya cukup banyak, hal ini bisa menjadi modal awal agar bisa menjadi

salah satu pemeran penting di Asia. Tapi perlu digarisbawahi, hal tersebut bisa dicapai jika pengelolaan SDA dijalankan dengan baik.

“SDA tidak serta-merta membawa kemajuan dan kesejahteraan jika kita tidak bisa mengelola SDA dengan baik. Karena SDA akan diperebutkan oleh berbagai negara yang memiliki sumber daya manusia, kekuatan politik dan ekonomi,” ungkap Prof. Nizam menjelaskan pentingnya pengelolaan SDA oleh SDM yang unggul.

Oleh karena itu, Prof. Nizam, pemerintah melalui Kemendikbud Ristek membuat sebuah program khusus yakni Kampus Merdeka. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kemendikbud Ristek yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Dengan kata lain Program Kampus Merdeka bertujuan untuk membantu menyiapkan SDM yang berkualitas dan unggul.

Sebagai narasumber terakhir, Dr. Ir. Gatot Dwianto, M.Eng. memberikan paparan yang menyampaikan bahwa perkembangan teknologi, digital, dan internet di Indonesia melaju sangat pesat. Menurutnya, untuk kemajuan Indonesia harus dibuat strategi untuk mewujudkan SDM yang unggul yang dapat menguasai IPTEK agar bisa bersaing dengan negara lain.

“Yang terpenting menjalankan Strategi IPTEK-Inovasi untuk bisa mendorong kualitas suatu bangsa,” ujar Gatot. Lebih lanjut Gatot juga menyampaikan bahwa dalam UU No.11 Tahun 2019 menyatakan IPTEK harus digunakan untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya jika anak bangsa berhasil menghasilkan suatu produk, produk tersebut harus didukung dan dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa.

DISKUSI PANEL PPSA 23

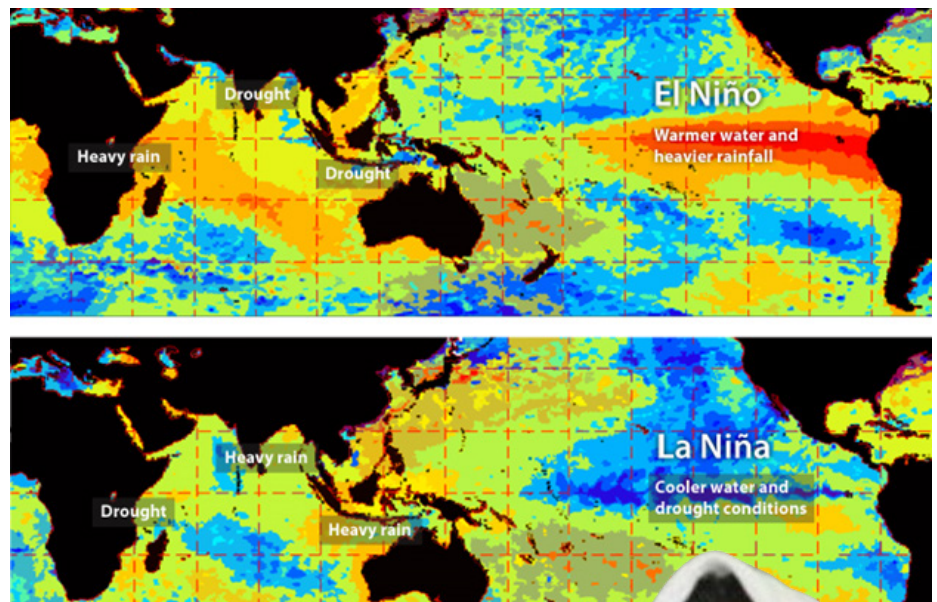
Kepala BMKG dan Ketua Umum IGI menjadi Narasumber pada Diskusi Panel PPSA 23

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D. dan Ketua Umum Ikatan Geografi Indonesia, Dr. Muhammad Dimiyati, M.Sc. memberikan ceramah kepada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23, Selasa (13/7). Diskusi panel yang dilakukan secara daring tersebut dihadiri 60 peserta PPSA 23 yang terdiri dari TNI, Polri, MPR RI, kementerian, lembaga non struktural, lembaga pemerintahan, partai politik, dan organisasi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Kepala BMKG mengangkat tema “Fenomena Perubahan Iklim sebagai Basis Kebijakan dan Kepentingan Nasional”. Dirinya menjelaskan bahwa posisi geografis Indonesia yang memberikan dampak berupa dinamika iklim.

Lebih lanjut, Dwikorita mengatakan hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara yang dikontrol oleh posisi gerak semu matahari. Ia mencontohkan kasus fenomena La Nina sebagai akibat dari kondisi suhu di Samudera Pasifik yang lebih dingin dari pada di perairan Indonesia, sehingga terjadi aliran massa udara basah dari Samudra Pasifik menuju kepulauan Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya intensitas curah hujan ekstrem mencapai 40% dari batas normal.

Salah satu upaya yang dilakukan



BMKG atas fenomena La Nina adalah melakukan peringatan dini di bulan Oktober agar masyarakat bisa mempersiapkan diri. Fenomena La Nina terjadi pada bulan November, Desember, dan puncaknya bulan Januari. Hal tersebut bisa mengakibatkan bencana alam berupa banjir dan longsor. “Fenomena alam dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia namun diperparah dengan fenomena perubahan iklim global,” kata Dwikorita.

Berdasarkan data yang ditampilkan Dwikorita mengenai La Nina dan El Nino, secara statistik periode ulang terjadinya La Nina dan El Nino pada tahun 1981-2020 mempunyai kecenderungan berulang semakin



cepat dibandingkan periode 1950-1980. Periode ulang anomali iklim global La Nina dan El Nino sebelum 1980 adalah 5 sampai 7 tahun sekali, namun 40 tahun terakhir menjadi 2 sampai 3 tahun sekali.

Sementara itu, Ketua Umum IGI, Dr. Muhammad Dimiyati, M.Sc. yang mengangkat tema “Ekologi Sebagai Basis Kebijakan dan Kepentingan Nasional”. Paparannya lebih berfokus



pada analisis interaksi antara organisme (manusia) dengan lingkungan biotik maupun abiotik pada wilayah geografis. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui manfaat serta menggunakannya secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan berbagai akibat yang ditimbulkan.

Menurut Muhammad Dimiyati ada lima masalah lingkungan hidup yang cukup besar di dunia ini, masalah tersebut adalah polusi udara, pembabatan hutan, pemusnahan biodiversitas, erosi tanah subur, dan tekanan ledakan populasi. Sebanyak 31% daratan di Indonesia didominasi dengan hutan, 80% makhluk hidup di darat menggantungkan hidupnya di hutan. Degradasi hutan yang terjadi mengakibatkan 18,7 juta hektar hutan/tahunnya hilang.

“Ini akan sangat berpengaruh pada apa yang ada di Indonesia dan sangat dikhawatirkan oleh beberapa para ahli,” ujar Muhammad Dimiyati. Deforestasi di Indonesia pada tahun 2012-2013

berada di angka 727.981 hektar/tahun dan sebagian besar deforestasi untuk hutan produksi. Indonesia berhasil menurunkan deforestasi 75,03% di periode tahun 2019-2020, hingga berada pada angka 115,46 ribu ha. Angka ini jauh menurun dari deforestasi tahun 2018-2019 sebesar 462,46 ribu ha.

Penurunan angka deforestasi ini, menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan KLHK akhir-akhir ini, menunjukkan hasil yang signifikan. Upaya tersebut diantaranya penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengendalian Kerusakan Gambut, Pengendalian Perubahan Iklim, Pembatasan perubahan Alokasi Kawasan Hutan untuk sektor non kehutanan (HPK), Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH/TORA), Pengelolaan Hutan lestari, Perhutanan Sosial, serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Sumber Foto: goodnewsfromindonesia.com

DISKUSI PANEL PPRA 62

Diskusi Panel PPRA 62 Bahas Penanggulangan Paham Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Drs. Boy Rafli Amar, M.H. dan Sekjen Kemenag RI, Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. menjadi narasumber pada diskusi panel Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62. Diskusi panel mengangkat tema “Penanggulangan Paham Intoleransi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia Melalui Politik Hukum” diselenggarakan pada Jumat (23/7), secara daring.

Komjen Pol. Dr. Drs. Boy Rafli Amar dalam paparannya menyampaikan bahwa intoleransi, radikalisme, dan terorisme adalah musuh bagi negara Indonesia karena tidak sejalan dengan Empat Konsensus Dasar Bangsa. “Kejahatan terorisme ini merupakan kejahatan extraordinary, kejahatan transnasional. Oleh karena itu, tiap negara perluantisipasi dengan sebaik baiknya,” kata Boy Rafli.

Boy Rafli mengungkapkan bahwa dalam perkembangannya intoleransi, radikalisme, dan terorisme adalah masalah global. Dalam 20 tahun terakhir, ada tiga organisasi teroris yang dinyatakan organisasi terlarang berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, yaitu Al-Qaeda, ISIS, dan Taliban.

Menurut Boy Rafli, meski dunia sedang mengalami pandemi, kelompok militan tidak menurunkan aktivitasnya. Sepanjang

tahun 2021 berbagai kelompok militan seperti Jihadis Suriah dan Hay'at Tahrir Al-Sham tetap memberikan ancaman teror. Kelompok militan ini justru menganggap Covid-19 sebagai situasi yang tepat untuk menghancurkan kekuatan politik dan ekonomi negara.

Dalam aspek pencegahan tindakan intoleransi, radikalisme, dan terorisme, Boy Rafli menyatakan terdapat tiga hal dalam aspek pencegahan, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, deradikalisasi serta pemantauan grup dan akun radikal. Membangun kesiapsiagaan nasional merupakan tanggung jawab semua pihak. Untuk mencegah paham radikal masuk ke dalam ranah yang lebih luas nan strategis, seluruh elemen masyarakat perlu untuk ikut serta menjadi bagian dari kesiapsiagaan nasional dalam pencegahan tindak pidana terorisme, karena ancaman akan selalu ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

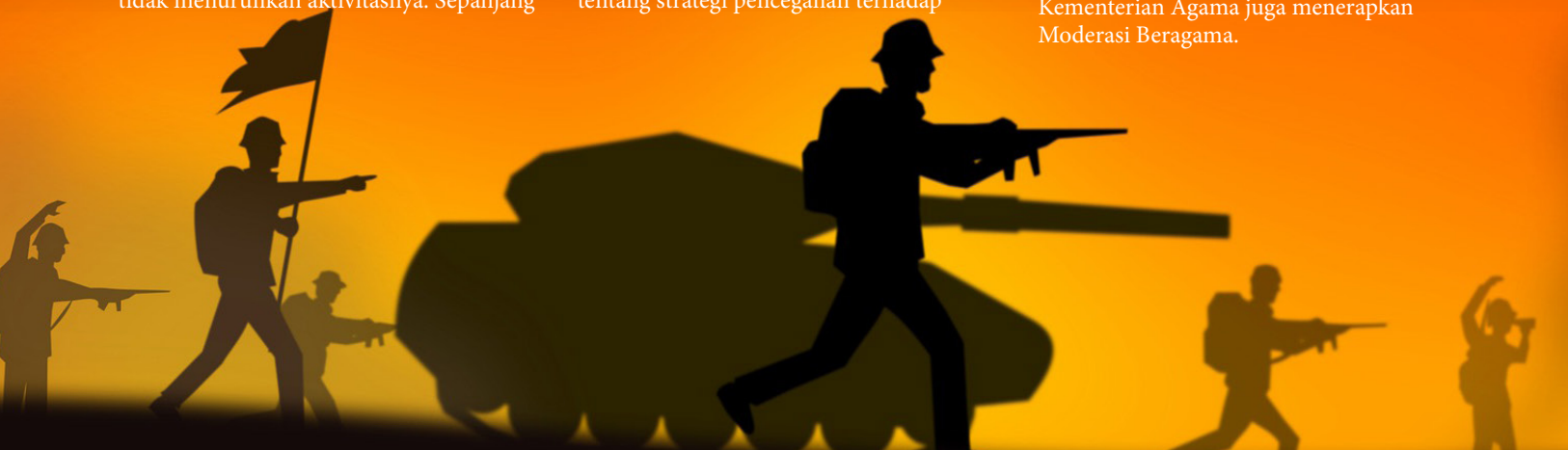
Dalam koordinasi bersama aparat penegak hukum, BNPT melakukan koordinasi tahap pra ajudikasi, koordinasi tahap ajudikasi, koordinasi tahap pasca ajudikasi, dan koordinasi tahap penempatan narapidana terorisme. BNPT berharap proses Criminal Justice System berjalan secara efektif.

Sementara, Sekjen Kemenag RI, Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., menjelaskan tentang strategi pencegahan terhadap

intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Indonesia. Menurutnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yakni memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat serta mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan. Kemudian Kementerian Agama juga mengeluarkan sebuah kebijakan sebagai tidak lanjut dari Kebijakan Nasional, yaitu Moderasi Beragama.

Program Moderasi Beragama dirancang sebagai perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Dengan adanya Moderasi Beragama diharapkan menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran sehingga Indonesia maju. Keberhasilan Moderasi Beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya empat indikator utama, di antaranya Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti Kekerasan, dan Penerimaan terhadap Tradisi.

Kementerian Agama melalui program Moderasi Beragama pada tahun 2021 ini, melakukan uji coba kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama dan akan melakukan Diklat Moderasi Agama kepada seluruh ASN Kementerian Agama pada tahun ini. Nizar berharap di tahun berikutnya, seluruh ASN diluar Kementerian Agama juga menerapkan Moderasi Beragama.



DISKUSI PANEL PPSA 23

Firli Bahuri: Etika dan Integritas adalah Poin Penting sebagai Pemimpin

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Firli Bahuri, M.Si memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 Lemhannas RI dengan mengangkat tema “Pemberantasan Korupsi”, pada Kamis (5/8) secara daring.

Firli Bahuri yang merupakan alumni PPSA 21 mengawali paparannya dengan mengutip pesan yang pernah disampaikan oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo kepadanya saat menjadi peserta PPSA 21. “Lemhannas bukan tempat untuk menunjukan siapa yang pintar, Lemhannas bukan tempat untuk bersaing sesama peserta, tetapi Lemhannas adalah tempat mengambil nilai tambah,” ujar Firli Bahuri membuka paparannya.

Selanjutnya Firli Bahuri menyampaikan bahwa para pendiri bangsa Indonesia menyepakati untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan nasional. Pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan nasional

tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut aktif memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan kehidupan sosial.

“Etika dan integritas merupakan salah satu poin penting dalam setiap gerak langkah kita sebagai pemimpin,” ujarnya. Lebih lanjut Firli Bahuri menjelaskan etika dan integritas di dalam ASN yang disebut Panca Prasetya Korpri, Firli menyampaikan bahwa beberapa hari lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan tentang Core Values ASN Berakhlak. Terdapat tujuh poin dalam Core Values ASN Berakhlak diantaranya yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Pada kesempatan tersebut, Firli Bahuri menyampaikan faktor penyebab korupsi menurut teori Jack Bologne. Teori Jack Bologne menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi diantaranya adalah greed (keserakahan), opportunity (kesempatan), need (kebutuhan), dan exposure (pengungkapan). Sementara itu faktor penyebab korupsi juga didukung oleh buruk dan lemahnya sistem sehingga membuat orang ingin berbuat korupsi, hal tersebut terjadi karena kurangnya etika dan integritas.

Berdasarkan Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan perekonomian negara. Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan dikelompokkan menjadi tujuh jenis besar Tipikor. Tujuh jenis korupsi yaitu pertama kerugian keuangan negara, kedua penggelapan dalam jabatan, ketiga perbuatan curang, keempat pemerasan, kelima gratifikasi, keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan ketujuh suap menyuap.

Saat ini ada tiga strategi KPK dalam pemberantasan korupsi. Pertama, melalui pendekatan pendidikan masyarakat, ini adalah upaya untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya korupsi, sehingga diharapkan masyarakat tidak ingin melakukan atau terlibat dalam berbagai perkara korupsi. Kedua, melalui pendekatan dan pencegahan melalui perbaikan sistem, hal ini akan menutup peluang bagi pihak-pihak yang ingin melakukan tindakan korupsi.

Dan yang ketiga, pendekatan pencegahan yang tegas dan profesional, hal ini bisa diimplementasikan pada penegakan hukum yang tegas namun tetap akuntabel. Bentuk penegakan hukum yang tegas seperti pemidanaan badan, perampasan harta kekayaan para pelaku korupsi serta mengembalikan kerugian negara, diharapkan timbul rasa takut dan kesadaran akan hukum serta tidak akan melakukan korupsi. “Strategi yang kita pakai berdasarkan kajian,” jelas Firli Bahuri.



Ketua Komnas Perempuan: Perlu Penguatan Kapasitas Perancang Kebijakan Di Tingkat Nasional Dan Daerah

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani memberikan ceramah secara daring kepada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 Lemhannas RI, dengan mengangkat tema “Makna Penting Kesetaraan Gender Bagi Ketahanan Nasional”, pada Jumat (30/7).

Andy Yentriyani membuka paparannya dengan menjelaskan tentang sejarah awal Komnas Perempuan, yang merupakan salah satu institusi pertama yang didirikan pasca reformasi atau sering disebut ‘Putri Sulung Reformasi’. Komnas Perempuan didirikan berdasar pada Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, keputusan ini terbit setelah Presiden Habibie menerima audiensi dengan Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang diwakili oleh Ibu Hartarto, Ita F Nadia, Shinta Nuriyah, Saparinah Sadli, Ibu Kuraisin Sumhadi, Ibu Mayling Oey, Mely G. Tan, Kamala Chandrakirana, dan Smita Notosusanto pada 15 Juli 1998. Landasan hukum Komnas Perempuan kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

Sebagai lembaga nasional hak asasi manusia yang berfokus pada isu kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan diberikan kewenangan selain tugas untuk melakukan penindakan publik, pemantauan, pencarian fakta, pendokumentasian kajian maupun bentuk kerjasama lainnya.

Lebih lanjut, Andy Yentriyani mengatakan bahwa seluruh informasi yang dikumpulkan melalui pemantauan, pencarian fakta, pendokumentasian kajian tersebut akan diserahkan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat untuk dijadikan basis untuk melakukan rekomendasi kebijakan dan pendidikan publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.



Pada kesempatan tersebut, Andy Yentriyani juga mengungkapkan fakta ketimpangan yang dihadapi oleh perempuan dibandingkan laki-laki di Indonesia. Dalam data yang terkurasi dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ada perbedaan antara pembangunan laki-laki dengan perempuan. Menurut data, nilai IPM perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki, bahkan sebagian wilayah memiliki nilai di bawah rata-rata nasional.

Indonesia saat ini berada di peringkat 107 dari 189 negara dengan nilai IPM

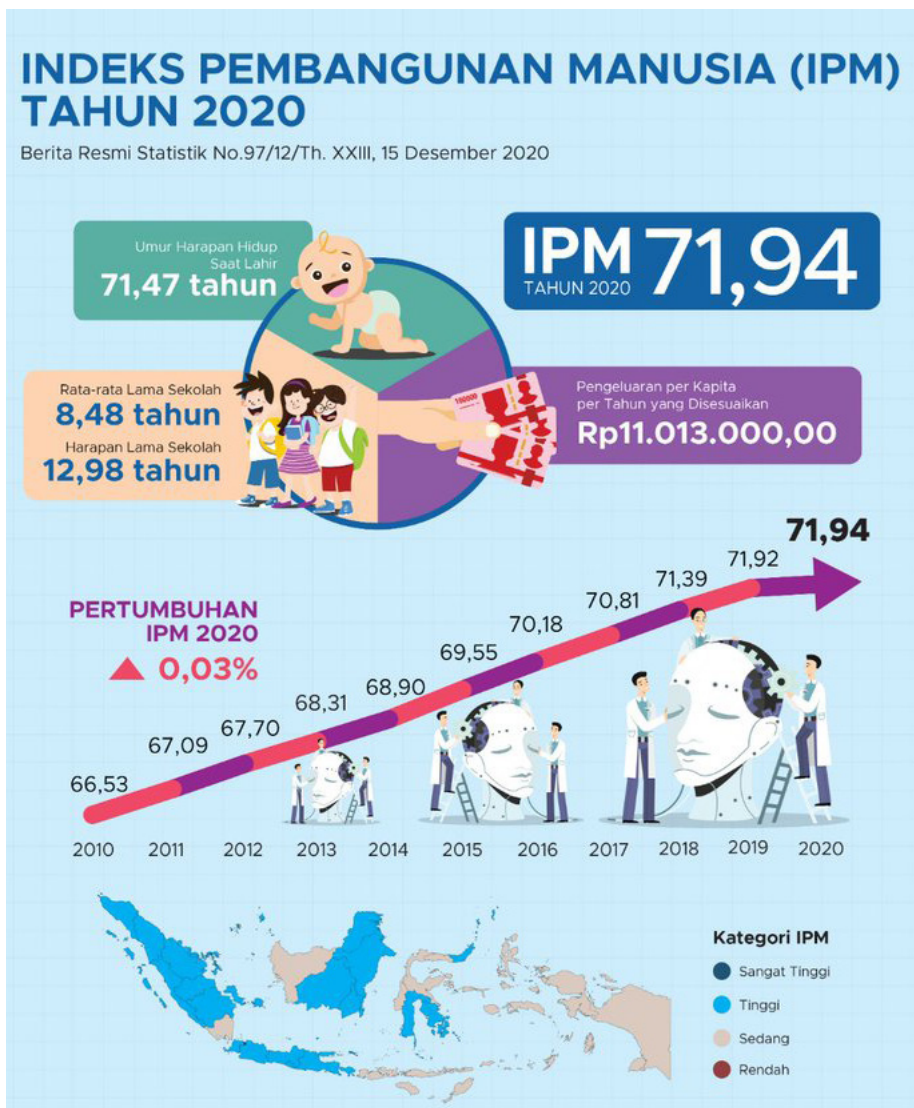
sebesar 0,761. Namun, sebagian besar masyarakat merasa bahwa sudah tidak ada lagi ketimpangan gender karena di Indonesia perempuan bisa berkiprah di banyak tempat dan berbagai sektor. “Bahkan di unit-unit keluarga kita tentunya kita mengenal perempuan tangguh dan kuat yang memiliki kontribusi yang luar biasa, bukan saja sebagai orang yang submissive ataupun yang pasif,” ujar Andy Yentriyani.

Selanjutnya Andy Yentriyani memaparkan himpunan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian

PPPA) yang secara berkala memberikan laporan tentang gambaran pembangunan gender di Indonesia. “Indonesia juga baru saja menyerahkan laporan tahunan pelaksanaan pembangunan Sustainable Development Goals berisi tentang target pembangunan berkelanjutan kepada forum internasional dan laporan Indonesia diapresiasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andy Yentriyani menunjukkan data tren pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh Komnas Perempuan setiap tahunnya bahwa angka kekerasan yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan meningkat hampir 68% dari tahun 2019 ke 2020. Pandemi Covid-19 memberikan dampak langsung pada peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebesar 8% pada ranah personal dan 10% pada ranah publik. Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus, yang ditangani oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus, Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus dan Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.

Komnas Perempuan dalam upaya pencegahan dan penanganan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan di tingkat nasional dan daerah melakukan penguatan kapasitas perancang kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan peraturan, undang-undang, dan kebijakan yang dibentuk akan kondusif bagi upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Komnas Perempuan juga mendorong adopsi agenda penuntasan pelanggaran HAM masa lalu sebagai satu aksi penting dalam meningkatkan akses perempuan kepada pelayanan publik.





Lemhannas RI Gelar Diskusi Jelang JGF V Tahun 2021

Lemhannas RI menyelenggarakan Diskusi Menjelang JGF V Tahun 2021 yang mengangkat tema “Culture and Civilization: Humanity at The Crossroads”, pada Jumat (13/8) secara daring. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut, Prof. Dr. Komarudin Hidayat, Rm. Franz Magnis Suseno, Rm. Dr. Baskara T. Wardaya, S.J., Lukas Luwarso, Nyoman Nuarta, dan Paulus Tri Agung Kristanto.

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjelaskan peta kerangka forum yang akan diselenggarakan sehingga semua narasumber mempunyai gambaran untuk menempatkan peran dirinya dalam peta tersebut. Agus Widjojo berpendapat bahwa kondisi saat ini terdapat dua aspek yang sangat dominan, yakni pandemi Covid-19 dan era digital.

Oleh karena itu, menurut Agus Widjojo, penting untuk mengetahui implikasi pandemi Covid-19 dan era digital bagi manusia sebagai makhluk sosial. “Manusia sebagai makhluk sosial sangat dihalangi dengan adanya pandemi Covid-19, apa implikasinya dan seberapa jauh pengaruh ke masa depan dan membekas kepada manusia sebagai makhluk sosial,” ujarnya.

Salah satu tujuan dalam diskusi ini adalah untuk mendapatkan saran dan masukan siapa yang akan menjadi narasumber yang berasal dari luar negeri dalam JGF V Tahun 2021. Dalam kesempatan tersebut, Komarudin Hidayat mengusulkan nama Robert Hefner dan Kishore Mahbubani. Pengusulan nama Robert Hefner karena menurutnya, merupakan seseorang yang berasal dari luar Indonesia namun dianggap sangat memahami antropologi budaya Indonesia. Sedangkan Kishore Mahbubani diusulkan karena merupakan seorang tokoh vital dalam pengembangan Singapura yang dulu dikenal hanya sebagai tempat

Manusia sebagai makhluk sosial sangat dihalangi dengan adanya pandemi Covid-19, apa implikasinya dan seberapa jauh pengaruh ke masa depan dan membekas kepada manusia sebagai makhluk sosial.

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Foto.
humas-lhn



transit dan berbelanja, dalam waktu singkat berhasil diubah menjadi pusat keilmuan dan bahkan mediator politik antara pemimpin barat dan timur.

Kesempatan berikutnya, Romo Magnis yang menyampaikan ramalan Yuval Noah Harari. Ramalan tersebut menyatakan bahwa dalam 30 sampai 40 tahun lagi diperkirakan 50% umat manusia akan menjadi tidak relevan dengan keadaan. Bahkan tidak menutup kemungkinan sebagian negara di dunia juga menjadi tidak relevan.

Menurut Rm. Magnis, hal tersebut merupakan suatu mimpi buruk luar biasa. Dalam kesempatan tersebut, Romo Magnis tidak menyebutkan nama secara spesifik untuk menjadi narasumber. Namun Romo Magnis menyatakan dukungannya jika narasumber adalah orang asing yang dalam hatinya sudah tidak asing dengan Indonesia sehingga bisa memberikan masukan.

Romo Baskara juga menyatakan dukungan atas usulan nama Robert Hefner. Menurutnya, Robert Hefner penting untuk dihadirkan karena tulisan-tulisan yang dihasilkan Robert Hefner tidak hanya berdasarkan opini, namun berdasarkan penelitian langsung di lapangan.

“Selain intelektual yang ahli mengenai Indonesia saya kira juga penting kita hadirkan (karena) beliau ini hatinya juga



ada di Indonesia,” tutur Romo Baskara. Nama lain yang diusulkan Romo Baskara adalah Yuval Noah Harari. Menurut Romo Baskara, kehadiran Yuval Noah Harari dapat memberikan penglihatan mengenai peradaban dari sudut pandang yang sangat global.

Selanjutnya Romo Baskara juga mengusulkan nama Anthony Reid, seorang profesor dari Australian National University (ANU). Anthony Reid banyak menulis karya ilmiah mengenai Indonesia dalam konteks Asia Tenggara. Usulan nama narasumber terakhir yang diberikan Romo Baskara adalah Jeffrey Winters yang banyak melakukan penelitian mengenai Indonesia dan banyak menuliskan buku-buku yang menarik.

Pada kesempatan tersebut, Lukas Luwarso yang juga hadir mengusulkan beberapa nama, yakni Steven Pinker, Fareed Zakaria, Arundhati Roy, dan Rutger Bregman. Usulan nama Steven Pinker teretus karena Lukas Luwarso menilai tulisan Steven Pinker dalam beberapa buku sangat bagus, salah satunya adalah *The Better Angels of Our Nature* yang berisikan tentang bagaimana manusia semakin meninggalkan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan persoalan. Pemilihan nama Fareed Zakaria, karena salah satu bukunya *Ten Lessons for a Post-Pandemic World* menjelaskan bagaimana dunia setelah era pandemi.

Selanjutnya Arundhati Roy diusulkan menjadi salah satu narasumber dalam JGF V karena dirinya adalah seorang penulis perempuan yang sangat bagus dalam hal-hal kecil yang bisa mempengaruhi peradaban dan kebudayaan, karyanya *The God of Small Things*, memenangkan the Man Booker Prize untuk kategori fiksi pada tahun 1997. Terakhir adalah Rutger Bregman, seseorang yang bukunya sering dibandingkan dengan buku Yuval Noah Harari.

Narasumber selanjutnya, Nyoman Nuarta mengusulkan nama Zong Kuto dari Prancis karena dinilai paham dengan budaya Indonesia. Selain itu, Nyoman Nuarta juga mengusulkan nama Ai Weiwei seorang seniman dan aktivis yang berasal dari Cina. Pengusulan nama Ai Weiwei berangkat dari pengalaman hidupnya yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan juga hak asasi di negaranya. Nama lain yang diusulkan Nyoman Nuarta adalah James Bridle, yakni penulis buku *New Dark Age: Technology and the End of the Future*.

Sedangkan Paulus Tri mengusulkan nama Perdana Menteri Jepang periode tahun 2012-2020 Shinzo Abe. Hal tersebut dilatarbelakangi ketertarikannya dengan pernyataan Shinzo Abe pada World Economic Forum Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Jepang dan Dunia sudah harus masuk pada era yang disebut Society 5.0. Kesadaran atas hal tersebut dikarenakan Jepang mulai merasakan banyak orang-orang tua dalam keluarga Jepang yang makin menua dan butuh layanan kesehatan tapi punya keterbatasan fisik. Sehingga dikembangkanlah teknologi untuk membantu dalam bentuk telemedicine.

“Saya mengusulkan pembicara salah satunya adalah Shinzo Abe, mantan Perdana Menteri Jepang supaya bisa memberikan gambaran kepada kita tentang simpang jalan peradaban itu menuju penghargaan yang lebih tinggi kepada manusia,” jelas Paulus Tri. Selain Shinzo Abe, Tri juga mengusulkan Satya Nadella yang berasal dari India sehingga memiliki kedekatan dalam lingkup Asia dan memiliki kemampuan untuk bicara tentang bagaimana teknologi membantu manusia menemukan peradaban berikutnya dalam konteks yang lebih manusiawi.

RTD KAJIAN JANGKA PANJANG

“Mencari Solusi Komprehensif bagi Penyelesaian Masalah Papua”



Sumber Foto: kataindonesia.com

Lemhannas RI mengadakan Round Table Discussion (RTD) Kajian Jangka Panjang “Mencari Solusi Komprehensif bagi Penyelesaian Masalah Papua” pada Kamis (12/8) secara daring. Hadir tujuh narasumber dalam RTD tersebut, yakni Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam RI, Mayjen TNI Hilman Hadi, S.IP., M.B.A., M.Han., Pakar Sosial Budaya dan Pendidikan, J. Sudrijanta, S.J., Penelitian Senior LIPI, Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc., Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksdya TNI (Purn) Freddy Numberi, Guru Besar Fakultas Hukum UI, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, S.H., M.Si., serta Mantan Dubes Indonesia untuk Australia dan Tiongkok, Prof. Dr. Imron Cotan.

Mengawali RTD, Deputy Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur Lemhannas RI. Dalam laporannya, Reni Mayerni menyatakan bahwa pelaksanaan RTD ini merupakan salah satu bentuk kegiatan Pengkajian Strategik Lemhannas RI dalam mengakomodasi ide-ide cerdas dan pemikiran strategis dari para narasumber termasuk juga mengakomodasi saran masukan dari para peserta diskusi. Ide-ide cerdas dan pemikiran strategis tersebut akan

diakomodasikan oleh tim penyusun kajian Lemhannas RI yang kemudian dijadikan bahan masukan dalam bentuk rekomendasi dan saran kebijakan kepada Presiden RI.

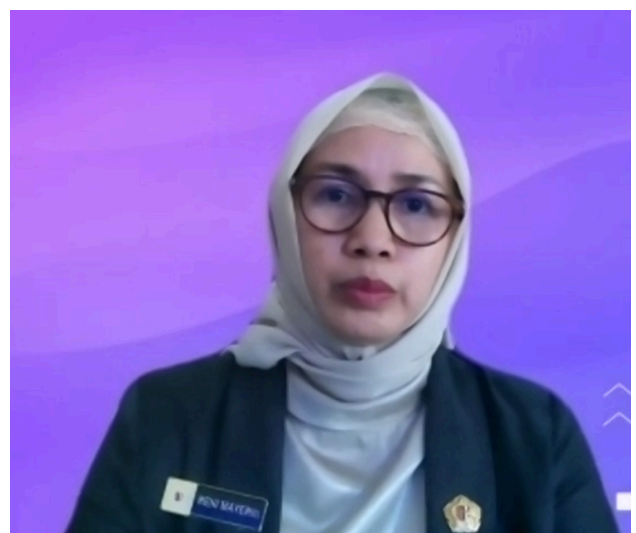
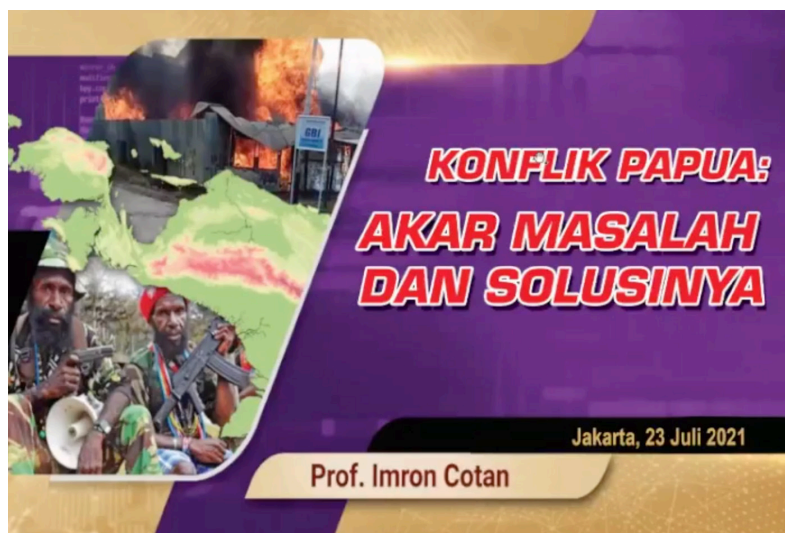
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan pemikiran dari Gubernur Lemhannas RI. Menurut Agus Widjojo, penyelesaian masalah Papua harus berangkat dari kejujuran dari semua pihak. “Jadi disini kita tidak bisa hanya berada pada posisi normatif, hanya dalam posisi untuk menyalahkan pihak yang kita hadapi dan memberi justifikasi kepada pihak kita sendiri,” jelas Agus Widjojo. Selama semua pihak tidak bisa memposisikan diri untuk menyelesaikan masalah maka maka dapat dikatakan tidak akan lahir ide-ide cerdas dan pemikiran strategis. Dengan kata lain, penyelesaian masalah akan selalu menuju jalan buntu.

Agus Widjojo juga menegaskan bahwa satu hal yang juga harus dipegang teguh dalam penyelesaian masalah kepentingan bersama. Oleh karena itu hendaknya digunakan pendekatan kepentingan kebangsaan yang berdasarkan pada Empat Konsensus Dasar Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Sejauh apapun perbedaan pendapat, jika masih berdasarkan pada Empat Konsensus Dasar Kebangsaan, niscaya masih bisa ditemukan titik tengah yang berada dalam jalur yang benar.

Pada kesempatan tersebut, Agus Widjojo juga menuturkan bahwa diskusi-diskusi mengenai Papua memang sudah sering diadakan, namun sering juga dalam diskusi tersebut hanya untuk mendengarkan kata-kata klise. “Kita harus sampai kepada pembahasan dan indikator konkret dari istilah-istilah yang klasik itu. Kita tidak mau hanya berujung pada istilah klasik normatif, tetapi kita menemukan ide-ide cerdas dan pemikiran yang strategis,” ujar Agus Widjojo menegaskan.

Agus Widjojo berpendapat bahwa fenomena apapun akan selalu berangkat dari proses sebab akibat. Oleh karena itu, harus ditemukan penyebab konkret dari masalah yang ada sehingga dapat ditemukan solusi konkret. “Kita tidak memerlukan berpuluh-puluh halaman penuh dengan nomenklatur-nomenklatur normatif yang sudah sering kita dengar dan yang sifatnya itu klasik, tidak. Kita ingin adanya argumentasi konkret untuk mencapai solusi-solusi konkret,” tutur Agus.

Diharapkan dari RTD tersebut muncul temuan yang lain daripada yang lain, tidak hanya mengulangi temuan yang sudah sering disampaikan. Harus muncul dengan sesuatu yang baru dan hal baru tersebut komprehensif dan sifatnya konkret.



**Presiden RI:
Indonesia
Tangguh,
Indonesia
Tumbuh,
Hanya Bisa
dicapai
Jika Semua
Bahu-
Membahu
dan Saling
Bergandeng
Tangan
dalam Satu
Tujuan**



Presiden RI Ir. Joko Widodo menyampaikan pidato

kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPD RI dan DPR RI dalam rangka HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI, pada Senin (16/8).

Foto.
humas-lhn



Pada pidatonya tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan analogi bahwa krisis, resesi, dan pandemi layaknya api yang membakar. Oleh karena itu, sebisa mungkin api harus dihindari, namun jika tidak memungkinkan jadikan itu sebuah pengalaman untuk dipelajari. “Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri, dalam menghadapi tantangan masa depan,” ujar Presiden memberikan arahan.

Presiden menyatakan bahwa ujian dan asahan adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bukan hanya beban yang diberikan, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga diajarkan. Tat kala ujian itu terasa semakin berat, asahannya juga semakin meningkat. Hal tersebut adalah proses menjadi bangsa yang tahan banting, kokoh, dan mampu memenangkan berbagai gelanggang pertandingan. Presiden menegaskan, dengan budaya yang selalu saling peduli dan saling berbagi, masalah yang berat ini bisa lebih mudah terselesaikan. “Mari kita pegang teguh nilai-nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tutur Presiden.

Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk melewati pandemi dengan usaha yang teguh, disertai dengan doa pengharapan yang tulus. Presiden juga menyadari begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa diselesaikan. Kritik yang membangun itu sangat penting, dan selalu dijawab dengan pemenuhan tanggung jawab, sebagaimana yang diharapkan rakyat. “Terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif, dan terus ikut membangun budaya demokrasi,” tutur Presiden dalam pidatonya.

Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, yang diangkat menjadi semboyan Bulan Kemerdekaan pada tahun ini, hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan siap berubah menghadapi dunia yang penuh

disrupsi. “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, hanya bisa dicapai jika kita semua bahu membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan,” kata Presiden. Dengan tegas Presiden menyampaikan bahwa harus tangguh dalam menghadapi pandemi dan berbagai ujian yang akan dihadapi dan harus terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa.

Oleh karena itu, Presiden menyampaikan bahwa APBN tahun 2022 harus antisipatif, harus responsif, dan fleksibel merespon ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. “APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi,” ujar Presiden. Sejak awal pandemi, APBN telah digunakan sebagai perangkat kontra-siklus, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat yang rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha.

Presiden menyampaikan bahwa mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Hal tersebut terlihat dari kuartal kedua 2021, yang mampu tumbuh 7,07% (YoY) dan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52% (YoY). Capaian ini harus terus dijaga momentumnya dan reformasi struktural harus terus diperkuat. UU Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi, dan Sistem OSS Berbasis Risiko adalah lompatan kemajuan yang dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor, tapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal. Untuk itu, produktivitas harus terus ditingkatkan. Produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas SDM membaik

serta diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha.

Kemudian Presiden menyampaikan enam fokus utama dalam kebijakan APBN tahun 2022. Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.



The logo for the 76th anniversary of the Indonesian Republic, featuring the number '76' in a stylized white font with 'TH' in a smaller font above the '6'.

76TH

A large, dark-toned statue of Sukarno, the first President of Indonesia, wearing a traditional Indonesian cap (peci) and a military-style jacket, holding a book. It is positioned on the left side of the page.

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

**PENYELESAIAN BERSAMA MENJADI
SATU-SATUNYA CARA.**

DENGAN BUDAYA YANG SELALU SALING PEDULI DAN
SALING BERBAGI, MASALAH YANG BERAT INI BISA
LEBIH MUDAH TERSELESAIKAN.
MARI KITA PEGANG TEGUH NILAI-NILAI TOLERANSI,
BHINNEKA TUNGGAL IKA, GOTONG ROYONG, DAN
PANCASILA DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA,
DAN BERNEGARA.

PRESIDEN JOKO WIDODO

Disampaikan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang
Bersama DPR RI dan DPD RI, 16 Agustus 2021.

A portrait of President Joko Widodo, wearing a traditional Indonesian cap (peci) and a dark blue traditional Indonesian shirt (korpri), looking slightly to the left. The background is a red and white geometric pattern.

**INDONESIA
TANGGUH
INDONESIA
TUMBUH**



“Hilirisasi Mineral dan Logam Tanah Jarang (LTJ), Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional”

Seperti diketahui LTJ memiliki banyak manfaat di berbagai industri, baik industri elektronik, industri otomotif, dan juga industri pertahanan.

P Lemhannas RI menyelenggarakan Round Table Discussion (RTD) tentang Hilirisasi Mineral dan Logam Tanah Jarang (LTJ) Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional pada Kamis, (19/8) secara daring. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari pendalaman kajian yang sebelumnya telah didahului dengan eksplorasi data dan fakta melalui Focus Group Discussion dan pendalaman materi kajian di Lokus Kalimantan Barat, Bangka Belitung, dan Sulawesi Tenggara.

Hadir dalam kesempatan tersebut sebagai narasumber Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Ir. Arifin Tasrif, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc., perwakilan Dewan Energi Nasional (DEN), Dr. Ir. As Natio Lasman, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. Selain narasumber, juga hadir empat orang pembahas, yakni Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Dr. H. Erzaldi Rosman, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Prof. Dr. Ir. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc., CEO PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Dr. Alexander Barus, dan Direktur

Pengembangan Usaha, Alwi Akbar.

Pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdyia TNI Wieko Syofyan mewakili Gubernur Lemhannas RI menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, Wieko Syofyan mengungkapkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang besar. Dengan kondisi geografis Indonesia yang terletak di jalur ring of fire, memperbesar potensi akan keberadaan mineral dan logam tanah jarang. Wieko Syofyan menegaskan bahwa sumber daya mineral dan LTJ merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh sebab itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral harus dapat dilakukan sebijaksana mungkin agar tetap bisa dinikmati lintas generasi.

Dalam paparannya, Menteri ESDM mengungkapkan bagaimana bahwa proses hilirisasi LTJ harus dilakukan. Hal ini berangkat dari adanya potensi peningkatan nilai tambah daripada materi yang dimiliki dan mampu menarik investasi ke Indonesia serta bisa menyerap banyak tenaga kerja. Lebih lanjut Arifin Tasrif menyampaikan bahwa diperlukan program yang membuat iklim investasi menarik, bagaimana materi-materi yang dimiliki bisa diproses untuk

ditingkatkan nilai tambahnya di dalam negeri sehingga bisa menumbuhkan industri dan bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Seperti diketahui LTJ memiliki banyak manfaat di berbagai industri, baik industri elektronik, industri otomotif, dan juga industri pertahanan. dalam industri elektronik, material LTJ dapat digunakan menjadi, di antaranya: magnet permanen untuk pembuatan baterai alat-alat elektronik portable; baterai kendaraan listrik; turbin penghasil energi ramah lingkungan; katalis pemecah cairan pada penyulingan minyak mentah; pembuatan layar televisi, chip silicon, monitor, lensa kamera, LED (lighting emitting diode); CFL (computer fluorescent lamps); alat scanner; fosfor yang memberi warna pada lensa; bahan pembuat mesin sinar-X portable; Tabung sinar-x, MRI (magnetic resonance imagery); Aplikasi perawatan kanker dan lainnya.

Sementara, di dalam industri otomotif, LTJ digunakan dalam pengembangan mobil hybrid pada industri kendaraan. Kelompok logam Nd, Pr, Dy dan Tb merupakan bahan penting dalam pembuatan motor listrik dan generator mobil hybrid dan kelompok logam La, Be, dan Ce merupakan bahan penting

dalam pembuatan baterai mobil hybrid NIMH. Sementara, di dalam industri pertahanan, LTJ digunakan sebagai motor listrik pada pesawat tempur, tank, dan control center (Global Rare Earth Element Review, Defense National Stockpile Center).

Pada kesempatan tersebut Arifin juga menyampaikan rencana percepatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral. Kementerian esdm sedang melakukan beberapa proses salah satunya adalah memfasilitasi pembangunan smelter dengan menyusun program quick win dengan mekanisme market sounding-info memo. Proses tersebut terdiri dari tiga tahap, tahap pertama adalah pertemuan dengan para pembangun smelter untuk menginventarisasi kendala, tahap selanjutnya mengusulkan smelter menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga kendala dari sisi administrasi dapat lebih cepat terselesaikan, dan tahap terakhir adalah promosi internasional

proyek pembangunan fasilitas pemurnian mineral agar bisa mendapatkan partner yang tepat.

Dalam membantu memfasilitasi proyek smelter mendapatkan status PSN, Kementerian ESDM melalui kewenangannya telah mengusulkan 21 smelter, yang telah diusulkan oleh Kemenko Perekonomian kepada Presiden RI. Status tersebut diharapkan dapat memperoleh perlakuan percepatan dalam bidang perizinan dan urusan lainnya.

Hal-hal yang sudah diperoleh saat ini adalah terkait dengan membantu fasilitas pendanaan, beberapa bank di Indonesia telah melakukan dukungan pendanaan. Kementerian ESDM juga membantu memfasilitasi suplai listrik dari PLN. “Sembilan perusahaan sudah berhasil difasilitasi oleh PLN sebesar 630 MW, sedangkan yang sudah melakukan SPJBTL (Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) dengan PLN terdapat

8 perusahaan sebesar 697,5 MW” kata Arifin.

Sedangkan dalam potensi LTJ, Kementerian ESDM telah membuat Rencana Aksi Penyelidikan Potensi Mineral LTJ (2021-2024). “Program ini akan kita detailkan agar bisa dimonitor di Indonesia progresnya,” ujar Arifin. Strategi yang dilakukan adalah melakukan inventarisasi dan eksplorasi mineral LTJ dalam 5-10 tahun ke depan, bekerja sama dengan penyedia teknologi untuk menentukan teknologi pengolahan LTJ yang terbukti sesuai karakteristik mineral di Indonesia dan melakukan alih teknologi kepada SDM Indonesia, menerbitkan peraturan tentang tata kelola perdagangan produk pengolahan LTJ dengan prioritas pemenuhan kebutuhan di dalam negeri dengan tetap membuka peluang ekspor, serta mengatur dan meningkatkan peran nyata masing-masing instansi pemerintah dalam pengelolaan LTJ.



LOW CARBON SHOT
UNDERSIZE

Marsma TNI Suroto, S.T., M.A.P

Bukan saya yang hebat, tapi Allah yang meringankan

Marsma TNI Suroto, S.T, M.A.P., adalah anak bungsu dari dua bersaudara yang lahir dan dibesarkan di tengah kota Surabaya. Hidup di wilayah yang cukup dekat dengan sarana olahraga membuat Suroto jatuh cinta dengan berbagai olahraga. “Persis dekat itu ada lapangan softball, terus kemudian sebelah kirinya itu sarana olahraga panahan dan hoki,” kenang Suroto masa kecilnya.

Dibesarkan oleh kedua orang tua yang bekerja di dunia kesehatan membuat dirinya memiliki modal awal yang membuat dirinya selalu mengedepankan gaya hidup sehat. “Kebetulan kedua orangtua saya dirumah sakit, bapak saya di Karamenjang sebagai tenaga pengajar analis kesehatan. Sementara ibu saya seorang perawat yang saat itu menjadi kepala dapur rumah sakit,” ucapnya.

Semasa kecil, Suroto merasa seperti memiliki empat orang ibu. Ibu pertama

adalah yang melahirkan, ibu kedua merupakan ibu persusuan. Hal tersebut terjadi karena kesibukan ibu kandungnya dalam bekerja sehingga memiliki saudara sepersusuan dengan tetangganya. Orang ketiga yang dianggap ibu olehnya adalah bulik yang merawatnya dari kecil. “Setelah disusui, bulik saya ini yang momong, karena kan beliau tinggal sendiri” ucapnya sambil mengingat.

Sedangkan yang terakhir memiliki kisah yang cukup unik. Suroto menceritakan dirinya dianggap anak, karena suatu hari pada saat ibu ini sudah hamil 6 bulan pada suatu malam itu bermimpi memberikan ayam jago ke orangtua Suroto yang pada saat itu sudah hampir 8 tahun tidak hamil. “Karena memang belum ada rencana. Tiba-tiba besoknya itu ibu saya hamil, nah itu dianggapnya saya itu anaknya dia yang dititipin ke ibu saya,” jelas Suroto.

Sampai dirinya tumbuh dewasa Suroto diasuh oleh keempat “ibu” ini. Dirinya

merasa sangat beruntung sekali dibanding teman-temannya. Karena salah satu menurutnya, uang jajan yang diterimanya lebih banyak dibanding teman-teman sebayanya.

Taruna

Suroto mengakui bahwa tidak ada satupun dari keluarganya yang merupakan anggota TNI. Namun cita-citanya untuk menjadi anggota TNI telah ada sejak dirinya masih anak-anak. Hal ini dipicu karena saat kecil dirinya sering melihat anggota marinir yang berolahraga di dekat rumahnya. “Sehat - sehat orang ini, mantep-mantep lah, dari situlah saya ingin jadi tentara,” tutur Suroto.



Setelah lulus SMA, Suroto remaja ingin mewujudkan cita-cita masa kecilnya. Berbagai upaya dilakukannya untuk membentuk fisik yang mumpuni dan dapat melewati berbagai tes seleksi taruna. Dibantu oleh ayahnya yang memiliki pengetahuan di bidang medical check up, Suroto benar-benar menyempurnakan kondisi fisiknya untuk selangkah lebih maju lolos tes seleksi.

Setelah melalui beberapa tahapan seleksi, ternyata Suroto diterima di AKABRI Tahun 1989. Meski sudah resmi diterima sebagai taruna, saat itu dirinya belum memutuskan masuk ke dalam matra yang mana, baik itu angkatan udara, angkatan laut, maupun Angkatan Darat.

Mulanya yang ada di benak Suroto adalah memilih Angkatan Laut atau Angkatan Udara. Namun saat psikotes itu salah satu temannya berujar bahwa jika berada di Angkatan Laut akan sulit bertemu keluarga, karena harus berlayar hingga berbulan-bulan hingga tahunan. Saat itulah dirinya memantapkan diri untuk memilih Angkatan Udara sebagai matranya. "Saya pilih Angkatan Udara, saya ubah itu semua dari 1-4 pilihannya udara (Angkatan Udara) semua", ujarnya dengan gelak tawa.

Berkeluarga

Suroto yang pernah menempuh pendidikan S2 di STIA LAN RI ini, menceritakan bahwa dirinya harus menunggu cukup lama sebelum bisa mempersunting istrinya, Rini Handarsari, S.H., Sp.N. Meski sudah saling kenal sejak masa SMA, komitmen baru terlaksana setelah Suroto menjalani 3 tahun pendidikan tarunanya. Hal tersebut terjadi karena jarak, dirinya berada di Magelang sedangkan kekasihnya di Surabaya. Lebih jauh, dirinya diminta menunggu calon istrinya lulus program magister sebelum bersedia dipersunting. "Dia tidak mau dinikahi sebelum selesai notarisnya, makanya saya tunggu," ujarnya mengenang masa itu.

Setelah menikah Suroto belum bisa tinggal satu rumah dengan istrinya, karena dirinya berdinis di Pekanbaru sedangkan istrinya bertugas di Sumenep. Untuk bertemu istrinya dirinya harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan rumit. Suroto harus naik pesawat dari Pekanbaru menuju Jakarta, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api menuju Surabaya, untuk selanjutnya

menyeberangi Selat Madura menggunakan kapal ferry, dan diakhiri dengan angkutan darat menuju Sumenep. "Untuk ketemu dia tuh, butuh perjuangan yang demikian segala rupa walaupun sudah menikah, penerbangan dari Pekanbaru ke Surabaya itu belum ada, semua harus transit di Jakarta." ungkapnya.

Melalui diskusi panjang, akhirnya Suroto meminta istrinya untuk berhenti kerja dan ikut dengannya ke Pekanbaru. Keputusan ini tidak mudah diambil, karena istri Suroto harus membayarkan denda karena memutuskan hubungan kerja sebelum tempo yang disepakati di dalam kontrak kerja. Bermodalkan uang tabungannya yang didapatkan selama menempuh pendidikan di Inggris dan Amerika akhirnya Suroto bisa membayarkan denda yang diminta tempat kerja istrinya, untuk kemudian memboyong istrinya untuk ikut tinggal di Pekanbaru.

Saat ini Suroto telah dikarunia tiga orang putri, namun putri pertamalah yang memberikan kesan mendalam bagi dirinya karena barus bisa didapatkan setelah melewati long distance marriage. Terlebih menurutnya proses kelahiran putri pertamanya cukup unik, karena lahir lebih dua minggu lebih awal dari yang diperkirakan dokter kandungan. Dirinya menuturkan saat itu Pekanbaru belum semaju sekarang, sehingga dirinya harus menjemput bidan yang membantu proses persalinan dengan menembus hutan. Setelahnya, proses persalinan tidak berlangsung terlalu lama. "Paling rezeki itu ya yang pertama, jadi istri itu ga perlu ngeden (mengejan), jadi langsung keluar sendiri anak ini itu anak pertama," tuturnya sambil tersenyum.

Meski selalu hadir dalam setiap kelahiran ketiga putrinya, Suroto yang gemar berolahraga sejak kecil mengungkapkan bahwa pengalaman anak pertamanya lah yang sangat berkesan. "Proses lahirnya ini luar biasa, kalau adik-adiknya itu kan ibunya harus bersusah payah supaya anaknya keluar, kalau yang pertama enggak, kesannya anaknya yang keluar sendiri," ucap Suroto diiringi gelak tawa.

Dinas di NAD

Pada tahun 2000-an ketika berpangkat Mayor, Suroto bertugas di Nanggroe Aceh Darussalam yang sedang berstatus Daerah Operasi Militer (DOM). Suroto mengisahkan tentang perjuangan istrinya

mendampingi dirinya saat bertugas di NAD.

Saat itu istrinya sedang hamil calon anak kedua, dengan usia kehamilan 8 bulan. Istrinya harus kontrol kehamilan di dokter spesialis kandungan yang berada di Banda Aceh, lokasi ini berjarak 28 kilometer dari rumah dinas yang berada di Blang Bintang. Setelah menempuh perjalanan, dirinya dan istri tidak bisa langsung menemui dokter kandungan, karena dokter tersebut harus menjalankan tindakan medis terhadap pasien lainnya, pemeriksaan baru bisa dilaksanakan pada sore hari.

Hal ini lah yang membuat Suroto resah karena adanya ketentuan yang melarang anggota TNI untuk berada di luar markas setelah matahari tenggelam. Ternyata keresahannya menjadi nyata, di tengah perjalanan pulang, tepatnya di sekitar Kecamatan Lambaro, terjadi kontak senjata antara TNI dengan GAM. Untungnya, posisi Suroto berada di sisi yang sama dengan pasukan TNI, yaitu di jembatan yang menghubungkan Lambaro dengan Gudang Bulog, bersebrangan dengan anggota GAM di sisi lain.

Kontak senjata yang cukup intens dan berlangsung cukup lama memaksa istrinya yang dalam kondisi hamil harus turun dari mobil. Kontak senjata tidak kunjung reda, korban tewas mulai berjatuhan dan darah mengalir dimana-mana. Hal ini lah yang membuat Suroto mengambil keputusan untuk membawa istrinya kembali ke dalam mobil untuk putar arah mencari jalan pulang. "Tembakan sudah tidak karu-karuan lah, namanya juga malam. Musuh didepan itu tidak kelihatan. Bisa jadi sampai pagi," ujarnya mengingat kejadian itu.

Berbekal pengalamannya yang sudah berdinis selama enam bulan di NAD, akhirnya Suroto mengambil jalur yang bisa menjadi alternatif menuju rumah dinasnya. Meski jalur yang dipilihnya merupakan wilayah yang dikuasai GAM, dirinya tetap harus mengambil resiko karena tidak mungkin tetap berdiam diri di tengah baku tembak dengan kondisi yang sedang hamil.

"Senapan panjang, senapan pendek saya juga sudah bawa. Kalau misalnya kepepet ada apa-apa ya saya siram mereka", ujarnya dengan geram. Meski begitu, sepanjang perjalanan dirinya terus mengangkat tangan sebagai bentuk salam agar tidak diusik oleh anggota GAM.



Namun naas, begitu tiba di rumah dinas, istrinya mengalami pendarahan dan mengharuskan istrinya dibawa ke Jakarta. Namun karena kondisi yang kurang menguntungkan, Suroto harus merelakan anaknya meninggal setelah berbagai upaya dilakukannya. Menurut Suroto hal ini adalah salah satu bentuk pengorbanan yang dilakukan istrinya yang tidak akan pernah dilupakannya.

Selama dirinya bertugas di NAD, Suroto telah 11 kali mengantar jenazah ke Jakarta untuk diserahkan ke keluarganya. Ia mengingat betul jenazah siapa saja yang diangkutnya, tujuh orang Paskhas dan empat orang anggotanya. Setelah peristiwa pengantaran jenazah yang kesebelas mulai muncul kegelisahan pada dirinya terhadap keselamatan serta kebahagiaan keluarganya.

Pada kesempatan yang sama itulah dirinya tidak langsung kembali ke Aceh, namun menuju Mabes AU. Pada saat itu Suroto memberanikan diri untuk menghadap atasannya, dirinya melaporkan bahwa dirinya telah berdinis 12 tahun di luar Jawa, dan 3,5 tahun di DOM. "Tidak sampai 10 menit saya menghadap beliau, ucapnya saat mengingat-ingat kisah itu. Ternyata tidak sampai dua minggu dari Suroto menghadap pimpinannya terbitlah SKEP untuk dirinya. Suroto harus kembali

ke Jakarta untuk jadi Dandenma Kodikau pada tahun 2004.

Menjadi Dandenma adalah pengalaman yang luar biasa bagi Suroto. Berbekal pengalamannya saat berdinis di daerah, membuat tiga tahun menjadi sangat ringan bagi dirinya saat menjalankan jabatan tersebut. "Di daerah itu kan melayani pimpinan dari Jakarta itu kan luar biasa, udah biasa saya," ujarnya. Berkat prestasi dan kinerjanya, Suroto merasakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh atasannya. "Orang lain kalo SESKO AU itu harus lepas jabatan, alhamdulillah saya tidak," tuturnya.

Menurutnya segala tugas yang terjadi pada dirinya adalah rezeki dalam bentuk yang lain, maka dirinya selalu mencoba untuk amanah, bertanggung jawab, dan melaksanakan tugas itu dengan ikhlas. "Rezeki yang diberikan ke kita berapapun itu ya kita terima dengan ikhlas. Kunci semua itu yang tidak boleh kita lupakan adalah berdoa kepada Allah SWT," tegas Suroto. Dirinya yakin bahwa bukan dirinya yang hebat, tapi Allah SWT yang meringankan semua beban hidupnya sehingga bisa berada di titik ini. "Jadi saya sampe sini ini, udah capaian yang luar biasa. Bukan Suroto yang hebat tapi Allah yang memberikan jalannya," ujarnya penuh keyakinan.

Bagi Suroto, saat dirinya menerima SKEP pengangkatannya menjadi Kapuslab Lemhannas RI pada awal September 2020, adalah sebetulnya amanah, tanggung jawab dan harapan. Dalam memajukan dan mengembangkan Puslab Lemhannas RI. Untuk itu dirinya akan terus mengawal perkembangan dari dua laboratorium yang dimiliki Lemhannas RI, baik laboratorium pengukuran ketahanan nasional maupun laboratorium kepemimpinan nasional.

Suroto yang juga merupakan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 59 Lemhannas RI tahun 2019, berharap Puslab Lemhannas RI bisa menjadi mitra yang baik dan dapat berkontribusi nyata dengan berkolaborasi bersama kementerian, lembaga dan non kementerian yang terkait lainnya, termasuk pemerintah provinsi sampai kabupaten atau kota.

Sehingga manfaat maksimal yang dapat dirasakan secara nyata, baik dalam proses perencanaan pembangunan dan evaluasi program pembangunan nasional maupun untuk edukasi dan penelitian ketahanan nasional serta kepemimpinan nasional. "Ya sesuai tagline-nya Indonesia, menuju terwujudnya Indonesia tumbuh dan Indonesia tangguh. Kira kira seperti itu," ujarnya menutup wawancara.

Memaknai Kontribusi dan Manfaat Diri

Audrey Divananda, A.P.Kb.N

Pemilihan pegawai teladan tahun 2021 yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-56 Lemhannas RI bulan Mei lalu menghasilkan beberapa pemenang di tiap kategori. Setelah sebelumnya redaksi swantara berbincang dengan pemenang di kategori Perwira/Golongan III kali redaksi majalah swantara berkesempatan mewawancarai salah satu pemenang pegawai teladan kategori Tamtama/Golongan II.

Audrey Divananda, A.P.Kb.N yang lahir di Bogor, 22 tahun silam, merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Di usia yang terhitung masih sangat muda ini, sehari-harinya Audrey mengabdikan diri bertugas sebagai Pengadministrasi Keuangan Seksi Renprogladidik Subdit Progdik Ditprogbangdik Debiddikpimkatnas Lemhannas RI.

Seluruh Pendidikan formalnya ditempuh di Magelang, Sekolah dasar di SD Cacaban 4 Magelang, SMP 4 Magelang dan SMAN 1 Magelang. Ia mengaku sejak kecil menyukai aktivitas yang berbau seni, seperti menggambar dan melukis. “Dari kecil aku suka menggambar, mewarnai, sama melukis. Di rumah ada 3 trophy menang lomba menggambar sama mewarnai. kayanya cuma itu penghargaan sepanjang hidup ini. Sampe sekarang aku masih suka ngelukis sama mewarnai buat refresh diri kalo pas lagi penat.” ungkapnya.

Audrey Divananda, A.P.Kb.N

Bercerita mengenai cita-cita, audrey mengaku bahwa ia memiliki cita-cita seperti anak-anak lain seusianya. “Dari SD aku suka banget sama pelajaran IPA makanya pengen jadi dokter kaya cita-cita anak kecil biasanya lah. Tetapi seiring waktu Akhirnya suatu saat aku sadar kayanya aku ga jadi pengen punya cita-cita dokter deh, karena proses nya lama otomatis butuh biaya banyak kan.” jelasnya.

Setelah lulus SMA, Audrey memutuskan untuk melanjutkan langkahnya menuju pendidikan tinggi yang dapat membawanya meraih pendidikan sekaligus lapangan kerja. Duka atas meninggalnya sang Ayah justru menguatkan tekadnya untuk masuk ke sekolah kedinasan yang notabene memberikan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih terjamin.

“Pemikiran ini (masuk sekolah kedinasan) semakin didukung sama kejadian waktu papa meninggal pas aku kelas 2 SMA jadi semakin bulat tekad buat mencari sekolah dinas aja yang gratis dan langsung kerja karena ga mau ngerepotin mama sebagai single parents. Masalah mau lanjut kuliah pikir nanti aja kalo udah kerja kan punya uang sendiri jadi bisa biayain kuliah pake uang hasil keringat sendiri. Dan Alhamdulillah sekarang terwujud.” ungkapnya.

Dari sekian banyak sekolah kedinasan di Indonesia rupanya Audrey lebih tertarik menempuh pendidikan di PKN STAN, sadar akan seleksi masuk dan persaingan yang luar biasa ketat membuatnya semakin bersemangat untuk mempersiapkan ujian masuk.

“Waktu aku udah kelas 3 SMA, aku mulai siapin diri buat ujian sekolah kedinasan yang aku pilih yaitu PKN STAN, karena aku sadar pesaingnya banyak banget se-Indonesia Raya dan aku harus bisa lolos karena sekolah itu gratis dan langsung kerja. Singkat cerita, aku lolos masuk PKN STAN, kuliah disana, wisuda, lalu kerja sebagai PNS di Lemhannas RI.” tuturnya.

Baginya, memiliki kesempatan langsung bekerja sebagai PNS di Lemhannas RI

merupakan berkah dan amanah terbesar, terutama sebagai ladang pengamalan ilmu yang telah didapat setelah menempuh bangku perkuliahan.

“Motivasinya buat mengamalkan ilmu yang sudah didapat waktu di kuliah jadi harapannya bisa memberi sedikit berkontribusi buat negara sama lembaga. Karena apa yang dikerjain sekarang sangat relate sama ilmu yang diajarin waktu kuliah. Jadi berharap bisa bawa hal bermanfaat/sedikit perubahan ke arah yang lebih baik di bidang penganggaran.” jelasnya.

Mulai bekerja di usia muda pastinya menjadi tantangan tersendiri, terlebih karena belum sama sekali terjun ke dunia kerja, menjadikan pekerjaan pertama ini baginya terkesan menegangkan. Beragam ekspektasi dari diri dan tuntutan lingkungan mengiringi langkahnya membentuk pengalaman-pengalaman baru.

“Perjalanan sampai saat ini sudah mulai ngerasa enjoy sama apa yang dikerjain. karna sudah mulai terbiasa. Pengalaman yang ga terlupakan itu waktu pertama kali masuk ke unit kerja. Langsung dikasih tugas bikin paparan pakai PPT sama direktur. lumayan lama ngerjainnya dan masih kurang percaya diri. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan direktur dan aku kecewa banget. Dari sini jadi belajar kalau dikasih tugas baiknya inisiatif buat tanya/minta instruksi yang lebih jelas biar ga misscom. Misalnya meminta petunjuk paparannya mau dibuat seperti apa.” jelasnya.

Meraih penghargaan sebagai Pegawai Teladan tingkat Golongan II pastilah bukan tujuan khusus, melainkan hasil dari upaya-upaya dan kerja kerasnya selama ini. Menjadi diri yang bermanfaat adalah tujuan sesungguhnya.

“Dari dulu selalu coba nanemin ke diri sendiri kalo semua kesulitan pasti ada kemudahan dan kalau kita berbuat baik/ menolong orang lain itu sebenarnya buat diri kita sendiri, toh kita ga akan rugi juga kan kalau berbuat baik. Jadi sekarang kalo ngelakuin apa apa diniatin saja buat bantu orang lain jadi insyaallah

suatu saat kita bakal dibantu juga dari arah yang ga terduga.” terangnya.

Menjadi manusia yang bermanfaat tidak akan lepas dari kontribusi, keduanya merupakan keterhubungan alami, saling berkait, terutama sebagai abdi negara yang tidak lepas dari konsep melayani.

“Sebagai abdi negara yang digaji oleh negara dari uang rakyat, maka kita harus berkontribusi buat negara ini. Tidak perlu harus muluk-muluk bawa perubahan besar, hanya perlu dimulai dari diri sendiri yaitu dengan bekerja jujur dan bermanfaat untuk lingkungan terkecil (unit kerja).”

Menutup wawancara ini, Audrey berharap besar agar dapat memberi banyak ide dan inovasi untuk Lembaga terutama unit kerja saat ini. Dimulai dari tertib administrasi di bidang penganggaran hingga inovasi baru pada

Optimalisasi Media Online untuk Membangun Bangsa

Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr.

Tenaga Ahli Pengajar Bidang Politik dan Kewarganegaraan Lemhannas RI



Media online mengubah cara penyampaian informasi dan komunikasi

Dunia saat ini telah berubah sepenuhnya dengan pesatnya kemajuan teknologi, antara lain kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi yang mendorong tumbuhnya media online dan telah mengubah cara penyampaian informasi dan komunikasi. Media online sebagai sarana berkomunikasi, terhubung dengan jaringan internet melalui website dan aplikasi yang dapat berisi teks, suara, foto dan video. Bentuk dari media online mencakup semua jenis situs, termasuk situs berita, situs perusahaan, situs lembaga/instansi, blog, forum komunitas, media sosial, dan aplikasi obrolan.

Pemanfaatan media online telah menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, terlihat dari upaya setiap negara melakukan optimalisasi pemanfaatan media online dalam mencapai tujuan pembangunan dan pertumbuhan bangsanya, termasuk sosialisasi upaya pencegahan meluasnya pandemi Covid-19. Media online berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting di semua tingkatan pemerintahan, organisasi, dan masyarakat umum agar mampu melaksanakan peran dan partisipasi sosial dalam pembangunan bangsa selama masa krisis. Selain itu, media online digunakan untuk menyebarluaskan, mengkomunikasikan dan melahirkan berbagai pesan untuk bangsa, serta kehadiran media online

telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah, kemampuan masyarakat mendukung pengawasan, menyampaikan kritik dan saran yang membangun terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penyelenggaraan negara yang baik dapat menjadi optimal. Berkaitan dengan hal ini, mengapa pemerintah harus memanfaatkan media online secara optimal ?.

Keberadaan media online yang berkembang dengan pesat menuntut pentingnya pemerintah melakukan adaptasi, dan berupaya mengembangkan pemanfaatan bentuk-bentuk komunikasi baru tersebut. Media online memungkinkan semua orang dapat terlibat dalam dialog langsung dengan semua pihak, termasuk dengan pemerintah. Pemanfaatan media online oleh pemerintah dapat meningkatkan keterlibatan warga masyarakat dalam proses pembangunan. Ketika publik diikutsertakan dan komunikasi bersama terjaga baik, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat, serta informasi dan pesan yang disampaikan pemerintah ke masyarakat mengenai kebijakan dan masalah-masalah penting dalam pembangunan dapat diterima masyarakat dengan lebih baik. Bagaimanakah upaya pemanfaatan media online secara optimal agar mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan nasional?

Pemanfaatan media online yang optimal

oleh pemerintah akan memberikan manfaat khusus membangun komunikasi yang baik dalam menghadapi krisis. Penyebaran Covid-19 yang belum pernah terjadi memberikan tantangan baru pada hampir di semua aspek dan sektor publik, termasuk komunikasi. Pemerintah dituntut untuk menyampaikan dengan segera setiap pembaruan informasi publik, terutama kondisi perkembangan pandemi covid dengan rutin kepada publik yang selalu dilanda rasa kecemasan. Publik selalu melihat kepada pemerintah, tidak hanya untuk arahan, tetapi juga untuk membangun pandangan yang sama dalam cara mengatasinya. Pemerintah dapat menyampaikan pesan dengan cara yang jelas, tenang, cepat dan profesional melalui pemanfaatan media online. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan media online untuk meluruskan informasi-informasi menyimpang yang menyebar di masyarakat. Banyak berita hoaks yang tersebar di dunia maya, baik melalui media sosial atau aplikasi percakapan. Oleh karena itu semua orang harus mampu mendeteksi konten yang benar-benar fakta atau konten palsu agar terhindar dari misinformasi dan/atau disinformasi.

Media online dalam banyak kasus telah digunakan untuk mengoreksi kesalahan informasi (misinformation) dan penyimpangan informasi (disinformasi) yang ada di masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan komunikasi di



media online seperti media sosial untuk mendengarkan dan mengidentifikasi ketidakakuratan dan merespons dengan tepat sebelum menyebabkan kekacauan atau eskalasi oleh berita palsu. Misinformasi merupakan informasi salah yang dibuat dan disebarluaskan tanpa berniat untuk merugikan atau menipu, sedangkan disinformasi adalah informasi salah yang dibuat sengaja untuk menipu atau merugikan orang. Misinformasi dapat berubah menjadi disinformasi jika masih dibagikan oleh individu yang sudah tahu berita tersebut salah namun dengan sengaja menyebarkannya untuk menimbulkan keraguan atau menimbulkan perpecahan. Sebagai contoh, rumor, gosip, atau klaim konspirasi besar yang tidak berdasar dapat dianggap sebagai potongan informasi yang salah. Beberapa ciri informasi yang dapat dicurigai sebagai misinformasi atau disinformasi adalah selalu mencari darimana asal informasi tersebut. Semua orang harus berhati-hati dalam menerima informasi dan

cepat mencari informasi pembandingan lain. Hal ini sangat berguna untuk melakukan verifikasi informasi yang diterima. Akurat atau tidak akuratnya suatu disinformasi atau misinformasi memerlukan verifikasi. Sebagai contoh, misinformasi adalah seseorang yang tidak memperhatikan konteks historis informasi, akan mengklaim ke sesuatu yang sudah lama lalu melaporkannya sebagai informasi baru saat tersebut.

Informasi dan komunikasi yang ada di media online akan membentuk persepsi dari setiap individu dan elemen bangsa terhadap isu-isu yang ada di tingkat nasional maupun internasional. Jika pemanfaatan media online tidak disertai dengan karakter budaya bangsa yang dilandasi nilai-nilai dan norma yang baik oleh setiap individu masyarakat sebagai pengguna, maka keutuhan bangsa akan terancam.

Selain banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari media online, tidak dapat dipungkiri media online seringkali juga

rentan terhadap pemanfaatan yang negatif, penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, memprovokasi untuk memecah belah, bahkan memicu konflik antar masyarakat sehingga menimbulkan ketegangan dan ketidakharmonisan di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengaturan dan pembinaan dalam mengembangkan kesadaran internal individu masyarakat untuk memanfaatkan media sosial dengan beretika, bertanggung jawab serta berkontribusi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara konstitusional, warga Indonesia memiliki hak terhadap kebebasan untuk berekspresi, yaitu diatur dalam pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Seiring dengan pesatnya pertumbuhan media online, hak terhadap kebebasan berekspresi ini menjadi lebih mudah untuk dipenuhi. Di sisi lain dari setiap hak terdapat kewajiban untuk



melaksanakan hak tersebut dengan bertanggung jawab dan tidak mengganggu ketertiban bangsa. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan upaya untuk mendukung dan mengatur penggunaan media online beserta isinya yang tidak mengekang kebebasan berekspresi tetapi tetap positif dan konstruktif untuk kemajuan bangsa.

Optimalisasi pemanfaatan media online untuk pembangunan bangsa, dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut :

1) Pengembangan kebijakan yang selalu mendengarkan aspirasi masyarakat melalui media online dapat dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan untuk mendengarkan masyarakat atau sering disebut audiensi publik dengan memanfaatkan situs pemerintah dan juga media sosial. Hal ini akan membantu pemerintah dalam menjawab pertanyaan yang mungkin dimiliki masyarakat terhadap pemerintah dan mengetahui apa yang diinginkan masyarakat. Mendengarkan aspirasi masyarakat secara intensif dan berkelanjutan dapat diketahui kebutuhan masyarakat, dan mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam semua aktivitas pemerintah membangun bangsa, serta

dapat mengurangi pemanfaatan negatif dari media online yang terkait dengan penyebaran informasi dan komunikasi pemerintah dengan masyarakat.

2) Edukasi masyarakat dengan informasi-informasi benar dan menjadikan pemerintah sebagai referensi utama dari setiap informasi penting. Pemerintah perlu mengembangkan media online yang dimilikinya dengan menyajikan informasi-informasi dan data-data yang akurat, jelas, lengkap dan penting untuk masyarakat, serta memberikan kemudahan dalam mengaksesnya. Dengan demikian, media online yang dimiliki pemerintah dapat menjadi kredibel dan dipercaya oleh masyarakat, serta dijadikan sumber utama untuk pengetahuan dan bahkan pendidikan.

3) Peningkatan literasi individu masyarakat terhadap informasi-informasi palsu dan negatif. Masyarakat harus memiliki kapasitas untuk menangkal informasi palsu, dan harus memiliki kemampuan untuk menilai kebenaran dari setiap informasi yang diterima. Oleh karena itu diperlukan sikap kritis terhadap semua informasi yang diterima, diantaranya dengan selalu mengecek kredibilitas dari sumber informasi, dan memastikan bahwa informasi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai

agama, etika dan peraturan yang berlaku. Kesadaran dan komitmen bersama sangat diperlukan untuk tidak dengan mudah menerima dan menyebarkan informasi-informasi palsu dan yang menyebarkan ujaran kebencian dalam setiap komunikasi yang dilakukan.

4) Pengembangan regulasi yang mendukung dan kepatuhan yang tinggi terhadap aturan. Pemerintah perlu mengembangkan aturan lengkap dan jelas yang dapat dijadikan pedoman dalam memanfaatkan media online oleh setiap individu masyarakat. Peraturan-peraturan yang ditetapkan seharusnya tidak mengekang prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana yang sudah diatur dalam UUD 1945. Selain regulasi, ketaatan masyarakat terhadap aturan tersebut perlu juga dibangun. Pemerintah dapat meningkatkan ketaatan masyarakat melalui pendekatan yang bersifat persuasif dan humanis, sehingga dapat terjadi peningkatan kesadaran untuk memanfaatkan media online yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

Pemanfaatan media online sudah menjadi keniscayaan saat ini, dan dapat memberikan dampak yang baik maupun buruk bagi masyarakat dan bangsa, terutama jika pemanfaatannya dilakukan secara tidak bertanggung jawab, dan bertentangan dengan nilai dan norma yang ada. Oleh karena itu diperlukan pengoptimalan media online yang dapat berkontribusi dalam membangun dan memajukan bangsa.

Peristiwa G 30 S / PKI Dalam Berbagai Macam Sudut Pandang (Analisa Teori Dalang)



Brigjen TNI Agus Arif Fadila, S.I.P.

Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI

Sejarah Indonesia sejak diproklamasikan oleh Founding Fathers kita, Proklamator kita, Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, mengalami berbagai gejolak politik, sampai terjadinya pemberontakan bersenjata. Era pasca proklamasi sampai dengan pengakuan kedaulatan oleh Belanda, setelah Perjanjian atau Konverensi Meja Bundar, berbagai gejolak politik mengakibatkan tumbang dan bergantinya pemerintahan silih berganti, seperti pergantian kabinet Syahrir, kabinet Amir Syarifuddin, kabinet Hatta, sedangkan pemberontakan bersenjata PKI di Madiun, atau peristiwa Affair Madiun yang dilakukan oleh pihak oposisi, yaitu Front Demokratik Rakyat, tidak mengakibatkan pergantian pemerintahan. Pada era pasca pengakuan kedaulatan, di era Kabinet yang bercorak Parlementer, dan di era Orde Lama, terjadi berbagai pemberontakan bersenjata yang tidak mengakibatkan pergantian pemerintahan, seperti Pemberontakan APRA, Andi Azis, RMS, DI/TII, PRRI/PERMESTA, namun di akhir era Orde Lama, menjelang era Orde Baru terjadi pemberontakan berdarah yang mengakibatkan pergantian rezim, yakni Peristiwa G 30 S/PKI, sehingga peristiwa ini menjadi peristiwa yang paling fenomenal dalam perjalanan sejarah Bangsa, peristiwa paling getir, sekaligus peristiwa yang memunculkan berbagai sudut pandang dan berbagai versi.

Terkandung pertanyaan, mengapa peristiwa pada tanggal 30 September 1965 atau yang dikenal sebagai G30S/PKI, merupakan peristiwa kudeta paling dikenal. Hal ini karena hingga kini masih menjadi perdebatan siapa

dalang dari peristiwa berdarah tersebut. Dari banyaknya teori kontroversi yang menyelumuti peristiwa kelam tahun 1965 itu, berikut ini adalah tujuh diantaranya:

1. Gerakan 30 September 1965 merupakan Persoalan Internal di dalam Angkatan Darat (TNI AD). Teori yang dikemukakan oleh Ben Anderson, Coen Hotsapel, dan W.F.Wertheim ini menyatakan bila peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 merupakan persoalan internal Angkatan Darat (AD). Salah satu hal yang mendasari teori ini ialah pernyataan dari Letnan Kolonel inf. Untung Syamsuri. Ia menyatakan bila para pemimpin angkatan darat sibuk memperkaya diri dan hidup dalam gelimang kemewahan sehingga membuat nama baik Angkatan Darat tercemar. Akan tetapi, jika ditelusuri, pernyataan semacam itu sebetulnya bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya. Sebut saja Jenderal Nasution, yang berpangkat Panglima. Beliau hidup sederhana bersama keluarganya, tak bergelimang kemewahan seperti pernyataan Letnan Kolonel Inf. Untung.

Teori ini sangat lemah dan sangat mudah untuk dicari bantahannya, yaitu:

a. Walaupun pasukan yang dikerahkan dalam G 30 S ini sebagian besar dari jajaran TNI AD, 2 Batalyon dari Diponegoro dan Brawijaya, dua orang pentolan gerakan yakni Kolonel inf. Latief dan Brigjen TNI Soeparjo berasal dari TNI AD, bahkan Resimen Cakrabirawa yang terdiri dari 4 Batalyon yang berasal dari seluruh matra dan Polri, ternyata yang aktif bergerak adalah Batalyon I, yang mana Komandan Batalyonya sendiri bertindak selaku

Komandan gerakan. Namun terdapat fakta yang terbuka di pengadilan, bahwa pada beberapa pertemuan pra gerakan, ternyata melibatkan unsur-unsur di luar TNI AD, yaitu Mayor Soejono Komandan PPP Halim PK, Syam Kamaruzzaman tokoh PKI yang membidangi Biro Khusus, diketahui, direstui dan dikawal langsung oleh Ketua CC PKI DN.Aidit, serta beberapa personel dari TNI AU, TNI AL dan Kepolisian RI.

b. Dukungan dari sukarelawan dan sukarelawati yang telah dilatih oleh unsur TNI AU dipimpin oleh Mayor Soejono di Lubang Buaya, dengan dalih melatih masyarakat di sekitar pangkalan udara untuk ikut serta menjaga pangkalan (akibat terjadinya ledakan yang diduga sabotase di Pangkalan udara Iswahyudi Madiun), yang mana hal ini tidak diketahui secara persis oleh sebagian besar petinggi TNI AU, disebabkan oleh sabotase informasi yang dilakukan oleh Mayor Soejono dan beberapa personil intelejen TNI AU, terhadap para pimpinannya.

c. Dijadikannya Pangkalan Udara Halim PK. Sebagai basis gerakan dan tempat pengunduran, hal ini terbukti DN.Aidit berada dan memantau gerakan dari Halim, tanpa sepengetahuan sebagian besar pimpinan TNI AU. Para tokoh gerakan pada malam itu berada di Markas Komandonya yang berkedudukan di sebuah gedung yang dekat dengan kompleks Halim. Selanjutnya pasukan yang berasal dari luar Jakarta melaksanakan pengunduran ke Halim, demikian juga Presiden Soekarno pada saat gawat tersebut dibawa ke Halim, dengan tujuan untuk dimintai dukungan atas gerakan tersebut

(seperti yang diminta oleh Tokoh gerakan Brigjen TNI. Soeparjo yang menghadap Soekarno di Halim), namun Bung Karno tidak mendukung gerakan tersebut.

d. Pada tengah hari tanggal 1 Oktober 1965 saat gerakan itu pada titik kulminasinya, Untung berpidato di RRI, membubarkan Kabinet Dwikora (hal ini jelas bukan urusan TNI AD) dan memberikan *reward* kepada pasukan-pasukan yang terlibat langsung maupun tidak langsung pada gerakan di malam itu, disini jelas terlihat bahwa gerakan itu adalah gerakan makar, untuk mengganti pemerintahan, jadi bukan urusan internal suatu kesatuan (TNI AD), pada saat itu salah satu kementerian.

2. CIA Merupakan Dalang Peristiwa 30 September 1965. Teori kedua ini berasal dari sebuah tulisan karya Geoffrey Robinson atau Peter Scott. Berdasarkan teori ini, pihak Amerika Serikat sangat khawatir dan meyakini teori domino, yakni Asia Tenggara satu persatu akan jatuh ke tangan komunis termasuk Indonesia. Sedangkan kala itu PKI (Partai Komunis Indonesia) tengah kuat-kuatnya menanamkan paham komunisme di Indonesia dan menjadi Partai Komunis terbesar diluar Negara Komunis. Oleh sebab itu pihak Amerika Serikat, dalam hal ini CIA, menjalin kerja sama dengan kelompok tertentu di dalam lingkup Angkatan Darat, seperti yang disebutkan dalam Dokumen Gilchrist sebagai "The Local Army Friends". Tujuannya ialah untuk memprovokasi PKI supaya melakukan kudeta. Dan setelah nantinya PKI dinyatakan bersalah, partai ini akan dapat dihancurkan. Menurut teori ini, tujuan akhir dari dibuatnya skenario ialah untuk meruntuhkan kekuasaan Soekarno. Karena pada era itu Soekarno dikenal dekat dengan PKI. Namun teori ini tidak mempunyai dasar yang kuat, sebab sebagai Negara *super power*, USA tentu sangat *concern* terhadap Negara sestrategis Indonesia, dan mengkhawatirkan Soekarno yang semakin dekat dengan PKI, lantas melakukan operasi intelejen strategis tentu sangat mungkin, tidak hanya USA, banyak Negara baik blok barat maupun blok timur melakukan itu di Indonesia, namun secara langsung CIA melakukan gerakan 30 September ini dengan didukung oleh unsur-unsurnya

di Indonesia, tidak terdapat bukti yang signifikan, walaupun pasca gerakan, USA membantu secara langsung baik materiil maupun intelejen, kepada TNI AD yang waktu itu sudah dibawah kendali Mayjen TNI Soeharto, untuk melaksanakan pemberantasan terhadap PKI dan Underbouw nya.

3. Gerakan pada 30 September 1965 merupakan Titik Temu antara Kepentingan Dua Negara Besar. Greg Poulgrain ialah orang dibalik teori ini. Di mana ia berpendapat bila gerakan pada tanggal 30 September 1965 di Indonesia merupakan titik temu antara dua kepentingan negara besar, yakni Inggris dan Amerika Serikat. Di mana Inggris menginginkan agar Soekarno berhenti melakukan konfrontasi terhadap Malaysia. Karena memang pada saat itu Soekarno giat memprovokasi Malaysia dengan mengatakan bila Malaysia tak lain merupakan boneka Inggris. Dan keinginan Inggris itu dapat terwujud bila Soekarno tak lagi berkuasa. Sementara itu Amerika Serikat ingin Indonesia dapat terlepas dari paham komunis. Sehingga timbul spekulasi bila gerakan 30 September 1965 merupakan pertemuan dua kepentingan negara besar. Teori ini tentu sudah terbantahkan seperti pada teori sebelumnya, namun kepentingan USA dan Inggris di Indonesia terlayani dengan baik pasca gerakan 30 September, itu merupakan *blessing in disguise*, berkah atau anugerah terselubung yang tidak diduga sebelumnya.

4. Soekarno Merupakan Dalang Dibalik Gerakan 30 September 1965. Teori keempat ini disimpulkan oleh Anthony Dake beserta John Hughes. Teori ini sendiri bersumber dan didasarkan pada asumsi bahwa Presiden Soekarno ingin meniadakan kekuatan dari pihak yang tidak mendukung agenda nasionalnya, yaitu NASAKOM, Angkatan Kelima, yakni Buruh dan Tani dipersenjatai. Sebagian besar pihak yang menentanginya merupakan perwira tinggi Angkatan Darat. Partai Komunis Indonesia diketahui dekat dengan Soekarno dan pendukung berat ajaran – ajaran Soekarno, maka akhirnya partai ini pun ikut tersangkut paut. Asumsi ini kian kuat dengan pernyataan yang diberikan oleh Shri Biju Patnaik. Patnaik diketahui merupakan seorang pilot yang berasal dari India dan diketahui dekat dengan banyak pejabat. Dari pernyataan

yang diberikan Patnaik, diketahui bila pada tengah malam tanggal 30 September 1965, Soekarno memintanya meninggalkan Jakarta sebelum subuh menjelang, dan setelah itu beliau akan menutup akses lapangan terbang. Keterangan yang diberikan Patnaik tersebut secara tersirat menyatakan bila Soekarno seolah telah mengetahui jika akan terjadi hal besar kemudian. Akan tetapi teori ini menjadi lemah karena nyatanya Soekarno sama sekali tidak mendukung Gerakan 30 September 1965 itu, pada saat tokoh gerakan Brigjen TNI Soeparjo menghadap Soekarno di Halim PK, pada sore tanggal 1 Oktober 1965, sehingga Soeparjo menjadi lemas hilang semangat dan sudah merasa kalah. Bahkan beliau juga mengutuk gerakan tersebut pada sidang Kabinet Dwikora.

5. Soeharto Merupakan Dalang Gerakan 30 September 1965. Indonesian Tragedy merupakan judul buku yang ditulis oleh Brian May. Dari buku inilah hadir teori yang mengemukakan bahwasannya Mayjen TNI Soeharto, yang menjabat Pangkostrad pada saat itu, tak lain adalah dalang dari tragedi yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 itu. Teori ini hanya didasarkan pada hubungan personal masa lalu sampai terjadinya peristiwa tersebut, antara tokoh gerakan, yakni Kolonel inf. Latief dan Letkol Inf. Untung Syamsuri dengan Mayor Jenderal TNI Soeharto. Dalam buku ini, Brian May menyatakan bila adanya relasi yang dekat antara pemimpin Gerakan 30 September 1965, dengan Panglima Kostrad yang kala itu diduduki Mayor Jendral TNI Soeharto, dan pengakuan Kolonel inf. Latief, Komandan Brigif-1 yang telah melaporkan kepada Mayjen TNI Soeharto tentang akan adanya gerakan, baik beberapa hari sebelum gerakan maupun beberapa jam sebelum gerakan dimulai, yang ditemuinya di RSPAD Gatot Soebroto. Disamping itu juga mempertanyakan, mengapa Soeharto tidak diculik dan menjadi sasaran Gerakan 30 September, selanjutnya mengapa hanya Divisi Diponegoro dan Jawa Tengah saja yang sangat merespon gerakan di Jakarta ini dengan mengadakan gerakan serupa di wilayah Jawa Tengah, seperti pengambil alihan Markas Komando Divisi Diponegoro oleh para anasir Divisi yang sudah terbina oleh biro khusus PKI, dari tangan Panglima, serta penculikan dan

pembunuhan Komandan Korem dan Kepala Staf Korem Yogya, sementara Soeharto pernah menjadi Panglima di Diponegoro.

Teori ini sepiantas terlihat masuk akal dan logis, namun apabila kita analisa niscaya akan mendapatkan jawaban yang dapat menggugurkan teori ini. Mengapa Soeharto tidak ikut diculik, karena gerakan ini menyasar “lingkaran dalam” dari Letjen TNI Achmad Yani, yang sangat menentang NASAKOM dan Angkatan Kelima, sedangkan Soeharto bukan orang yang masuk dalam lingkaran dalam dari Achmad Yani, Soeharto sebenarnya lebih senior dari Achmad Yani, namun bukan orang yang berpendidikan luar negeri, dapat dilacak bahwa Achmad Yani menarik orang-orang yang berpendidikan luar negeri untuk menjadi “orang dekat”nya, untuk menjadi stafnya, seperti Achmad Yani agak “sungkan/segan” untuk menjadikan Soeharto itu menjadi stafnya, sehingga Soeharto dijadikan Pangkostrad, diluar dari lingkaran dalam Achmad Yani, Pangkostrad saat itu tidak mempunyai pasukan dalam jajarannya, hanya setingkat Detasemen Markas, yang langsung dibawah Pangkostrad, tidak seperti sekarang ini yang begitu prestisius dan membawahi begitu banyak pasukan.

Mungkin saja Letkol inf. Untung pernah dekat dengan Soeharto karena bersama- sama dari Diponegoro dan Soeharto pernah menjadi Panglima disana, sementara Untung merupakan perajurit yang menonjol dan berprestasi disana, demikian juga dengan Kolonel inf.Latief pernah memberitahu Soeharto tentang akan adanya gerakan itu, namun Soeharto mungkin tidak terlalu menggubris, karena tidak bersangkutan dengan dirinya dan Soeharto tidak menyangka kalau gerakan tersebut menyebabkan pembunuhan keji terhadap teman-temannya. Dalam biografinya Soeharto juga membantah telah bertemu Latief pada malam sebelum gerakan, di RSPAD saat menunggu putranya yang dirawat disana.

6. Teori Chaos. Teori Chaos adalah teori yang dikemukakan John D. Legge. Teori ini yang menyatakan bila tidak ada dalang tunggal maupun skenario besar tertentu pada peristiwa berdarah tahun 1965 itu. Melainkan perpaduan dari berbagai faktor yang bersalah dari

beragam kalangan. Seperti misalnya para pimpinan PKI yang sesat, beberapa anggota ABRI yang khilaf, hingga kepentingan-kepentingan negara Barat, kemudian akibat tindakan saling terhubung dan kemudian berkembang di lapangan menjadi gerakan pengambil alihan kekuasaan. Teori ini terlalu naif dan imajiner, padahal gerakan 30 September itu nyata telah direncanakan jauh sebelumnya, dengan bukti beberapa kali pertemuan untuk koordinasi dan membahas rencana gerakan.

7. Dalang Gerakan 30 September 1965 ialah PKI. Dari semua teori yang ada, barangkali teori yang dikemukakan oleh Ismail Saleh serta Nugroho Notosusanto ini merupakan teori yang paling terkemuka. Bahkan hingga kini, tragedi ini pun dikenal dengan nama G30S/PKI. Menurut teori ini, dalang peristiwa berdarah tahun 1965 itu ialah orang-orang PKI, walaupun tidak seluruh anggota Comite Central PKI/Politbiro PKI tahu menahu secara persis tentang gerakan itu. Menurut Ismail dan Nugroho dikatakan bahwa PKI memperalat anggota-anggota tentara yang telah mereka bina melalui Biro Khusus, yang diketuai oleh Syam Kamaruzzaman, salah seorang tokoh gerakan, untuk melakukan kudeta. Sedangkan dasar dari munculnya teori ini ialah sejumlah aksi serta kejadian dari tahun 1959 hingga tahun 1965 yang dilakoni oleh PKI. Dasar lain yang menguatkan teori ini ialah hadirnya sejumlah perlawanan bersenjata yang terjadi di daerah Jawa Tengah, Blitar Selatan, serta Klaten setelah peristiwa 30 September 1965, dan perlawanan tersebut dilakukan oleh kelompok yang melabeli diri sebagai CC PKI. Disamping itu pada persidangan Mahmilub, terbukti bahwa tokoh-tokoh PKI terlibat aktif dan langsung pada pertemuan-pertemuan sebelum hari H gerakan, untuk membahas, merencanakan, mempersiapkan dan mematangkan aksi. Kemudian DN.Aidit yang merupakan Ketua CC PKI, dan juga salah satu dari Menko pada Kabinet Dwikora, pada tengah malam terjadinya gerakan meninggalkan rumahnya dan diketahui kemudian menempatkan diri di salah satu rumah di dalam Pangkalan Halim. Setelah merasa gagal pada hari berikutnya, Aidit meninggalkan Halim menuju Jawa Tengah dengan

menggunakan pesawat dari TNI AU. Tidak mungkin Aidit bersikap seperti itu kalau dirinya tidak tahu menahu tentang gerakan itu. Selanjutnya apakah yang terlibat hanya beberapa oknum PKI atau PKI sebagai partai, tentu saja Partai yang merupakan organisasi/wadah adalah benda mati, orang-orang yang masuk dalam organisasi itulah yang menggerakkan, jadi sudah menjadi suatu kepastian kalau oknumnya berbuat itu demi organisasi, dedikasinya kepada perjuangan partai, maka sudah pantas kalau oknumnya diberangus, wadahnya juga dihancurkan/dibubarkan.

Dengan sangat rigid menganalisa, menggunakan seluruh indera, pikiran dan hati, serta mengungkapkan bukti-bukti yang ada menjadi fakta dan data, maka dari ketujuh teori tersebut, hanya teori yang menyatakan bahwa PKI lah sebagai dalangnya, merupakan teori yang mantiq/logis, masuk akal, faktual, tidak imajiner/ fatamorgana, akhirnya sudah pantas jika gerakan tersebut dilabeli Gerakan 30 September/PKI (G 30 S / PKI).

Pandemi Covid-19 dan PPKM

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kasus konfirmasi positif Covid-19 di Jawa dan Bali menurun hingga 96 persen. Penurunan ini jika diperbandingkan dengan kondisi puncak kasus konfirmasi positif pada 15 Juli 2021. “Secara spesifik kasus konfirmasi positif Covid-19 di Jawa-Bali juga turun hingga 96 persen dari titik puncaknya pada 15 Juli lalu,” ujar Luhut dalam konferensi pers secara virtual pada Senin (13/9).

Luhut melanjutkan, perkembangan kasus secara Covid-19 secara nasional juga terus menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan. Hal ini dapat terlihat dari penurunan tren kasus konfirmasi Covid-19 secara nasional hingga 93,9 persen. “Selain itu, jumlah kasus aktif Covid-19 saat ini juga sudah turun di bawah 100.000 hingga hari ini,” ucapnya.

“Karena hari ini kita kasus baru ada 2.577 kasus. Dan kesembuhan 12.000-an. Ini saya kira suatu progres yang sangat menggembirakan,” kata Luhut. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan dari 11 kota/kabupaten level 4 pada minggu lalu, pada hari ini

jumlahnya berkurang menjadi hanya tiga kota/kabupaten saja.

Luhut menilai capaian ini merupakan buah kerja sama semua pihak yang telah bersama-sama berhasil menjaga kondusivitas pemberlakuan PPKM. “Situasi Covid-19 yang membaik begitu cepat di Jawa-Bali, menyebabkan penurunan level PPKM yang lebih cepat dibandingkan perkiraan kita. Tapi, kehati-hatian kita juga harus, harus jadi yang sangat penting,” tutur Luhut.

Namun demikian, Luhut menilai penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali menyebabkan masyarakat euforia berlebihan. Banyak yang lantang dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona. “Penurunan level PPKM di berbagai kota menyebabkan banyak euforia dari masyarakat yang tidak disertai dengan implementasi protokol kesehatan dan penggunaan PeduliLindungi” cemas Luhut.

Luhut mengatakan bahwa situasi Covid-19 di Jawa-Bali memang membaik begitu cepat. Hal ini menyebabkan penurunan level PPKM yang lebih cepat dibandingkan perkiraan pemerintah.

Namun demikian, ia mengatakan, hal itu tidak diimbangi dengan kecepatan vaksinasi, implementasi PeduliLindungi, serta penerapan protokol kesehatan.

“Hal ini cukup berbahaya karena dapat mengundang gelombang berikutnya dari Covid-19,” ujarnya. Oleh karenanya, Luhut mewanti-wanti seluruh pihak untuk kembali disiplin menerapkan 3M, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Luhut mengingatkan bahwa penularan virus corona varian Delta masih terus terjadi. Penyebaran varian ini pun jauh lebih cepat dibandingkan varian terdahulu. Pemerintah, kata Luhut, bakal terus menerapkan kebijakan pembatasan melalui PPKM untuk menekan laju penularan virus corona.

“Sekali lagi mempertegas pertanyaan banyak orang kapan PPKM Level Jawa-Bali ini akan terus diberlakukan, pemerintah menegaskan akan terus memberlakukan PPKM Level ini di seluruh wilayah Jawa Bali dan melakukan evaluasinya tiap satu minggu guna menekan angka kasus konfirmasi dan tidak mengulang kejadian yang sama di kemudian hari,” tandas Luhut.

Sumber: kompas.com



Sumber. Humas Kemenko Marves RI



Eks Pejabat Afghanistan: Taliban Butuh Bantuan Ekonomi dari China

Mantan penasihat presiden Afghanistan angkat bicara soal pentingnya posisi Afghanistan bagi China. Hal ini pun berpengaruh kepada kedekatan Taliban dan China, meski dua pihak itu berbeda.

“Kepentingan mereka murni bersifat ekonomi dan politik,” ujar Mohammad Shafiq Hamdan, mantan deputi penasihat keamanan bagi Presiden Ashraf Ghani, kepada CNBC, dikutip Senin (13/9/2021).

China dan Taliban pun dinilai tak memiliki pijakan yang sama selain menjadi oposisi bagi kehadiran AS.

Hamdan juga memastikan bahwa China tertarik dengan sumber daya mineral di Afghanistan yang bernilai triliunan dolar. China pun dinilai sebagai alternatif bagi Taliban yang sedang sangat butuh bantuan ekonomi.

Sebelumnya, ABC Australia juga melaporkan prediksi pakar hubungan internasional terkait prospek investasi China di Afghanistan, termasuk yang berhubungan ke Jalur Sutera Baru alias Belt and Road Initiative (BRI).

China juga dianggap alternatif sebab negara-negara barat masih enggan berurusan dengan Taliban di Afghanistan. Ada pula kepentingan China terhadap sumber daya mineral di Afghanistan, termasuk lithium. Selain itu, China juga telah berjanji memberikan dana kemanusiaan bagi Afghanistan.

Ashraf Ghani adalah presiden Afghanistan yang kabur ke luar negeri setelah Taliban mulai menerobos ke Kabul. Ghani beralih terancam dihukum mati.

Laporan sebelumnya, China menjanjikan bantuan senilai 200 juta yuan atau setara

Rp 441 miliar ke Afghanistan, termasuk pasokan makanan dan vaksin COVID-19.

Bantuan itu datang ketika China mengatakan siap untuk menjaga komunikasi dengan pemerintah Taliban.

Ia menambahkan bahwa pembentukan pemerintah sementara baru adalah “langkah yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban” di Afghanistan.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengumumkan langkah-langkah bantuan untuk Afghanistan pada pertemuan pada Rabu (8/9), dengan rekan-rekan dari beberapa tetangga Afghanistan -- Pakistan, Iran, Tajikistan, Uzbekistan dan Turkmenistan.

Dia meminta negara-negara ini untuk bekerja sama dalam membantu Afghanistan, menambahkan bahwa China juga akan memberikan 3 juta dosis vaksin ke negara itu.

China juga secara vokal kritis tentang penarikan pasukan AS, dengan mengatakan pasukannya telah “menghancurkan” Afghanistan.

Sumber: liputan6.com

Warna Paling Dominan di Alam Semesta, dari Biru Toska hingga Krem

Ada banyak sekali warna yang menghiasi alam semesta ini. Warna-warna tersebut juga selalu berbeda saat pagi, siang, petang hingga malam hari. Namun, warna apakah yang paling dominan menghiasi alam semesta ini?

Hampir dua dekade silam, Ivan Baldry dan Karl Glazebrook dari Johns Hopkins University, Maryland, Amerika Serikat telah mengumpulkan sampel cahaya dari 200.000 galaksi yang memancarkan spektrum berbeda-beda. Sampel cahaya ini kemudian diolah ke dalam sebuah program komputer yang dapat menentukan spektrum tunggal rata-rata dari alam semesta, atau disebut juga spektrum kosmik. Spektrum kosmik

inilah yang kemudian dipersepsikan sebagai warna yang paling dominan di alam semesta, seandainya seluruh bintang di alam semesta dapat diamati oleh mata manusia pada jarak yang sama dari Bumi.

Spektrum yang dipancarkan oleh masing-masing galaksi sudah diolah terlebih dahulu dengan meniadakan efek pergeseran merah (redshift) atau efek Doppler pada gelombang elektromagnetik dikarenakan jarak masing-masing galaksi yang cukup jauh dari Bumi. Sehingga, spektrum yang diambil sampelnya adalah spektrum yang dipancarkan langsung dari galaksi alih-alih spektrum yang diterima oleh pengamat di Bumi.

Berikut beberapa warna yang diduga mendominasi alam semesta ini.

1. Biru toska. Awalnya, mereka berdua menduga spektrum kosmik atau warna yang paling dominan di alam semesta adalah biru toska atau pirus (fairuz/turquoise).

2. Krem (beige). Setelah ditelusuri, ternyata dijumpai kesalahan perhitungan di dalam program yang dibuat, sehingga dikoreksi menjadi krem (beige). “Warna krem inilah yang menjadi warna paling dominan di alam semesta yang kemudian diberi nama krem kosmik atau nama resminya cosmic latte, dinamakan berdasarkan warna latte (kopi susu/cafe

au lait) yang cenderung krem,” jelasnya. “Krem kosmik saat ini masih menjadi warna yang mendominasi di alam semesta,” tambahnya.

3. Biru. Meskipun demikian, Andi berkata, spektrum kosmik yang awalnya cenderung berwarna biru tidak sepenuhnya kurang tepat juga. Andi menuturkan, alam semesta beserta isinya selalu mengalami perubahan. “Ketika bintang mula-mula terbentuk, cenderung berwarna kebiruan sehingga warna yang mendominasi alam semesta adalah biru,” kata dia.

4. Merah. Seiring berjalannya waktu, bintang-bintang akan semakin meredup dan membengkak menjadi raksasa merah. “Warna yang mendominasi alam semesta akan semakin bergeser ke arah merah,” imbuhnya. Kelak, ketika seluruh bintang di deret utama (kecuali katai merah dan katai coklat) berevolusi menjadi raksasa merah, warna tunggal yang mendominasi alam semesta adalah merah.

5. Hitam. Lebih lanjut, kata dia, ketika raksasa merah ini meledak menjadi supernova dan menghasilkan lubang hitam, warna yang mendominasi alam semesta adalah “hitam” karena seluruh cahaya sudah diserap seluruhnya oleh lubang hitam dan tidak akan lolos.

Sumber: *kompas.com*



Pandemi akan menjadi peristiwa tak terlupakan bagi para pelaku sektor pariwisata di tanah air. Dalam kurun 1,5 tahun terakhir, pariwisata menjadi salah satu sektor paling terdampak. Sebelum terjadinya pandemi, pariwisata adalah primadona devisa Indonesia dari sektor nonmigas. Sampai akhir 2019, sekitar 16,11 juta wisatawan mancanegara berbondong-bondong masuk ke tanah air dan memberikan pendapatan kepada Indonesia sebesar USD20 miliar atau Rp280 triliun.

Laporan terbaru Badan Pusat Statistik menyebutkan terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Juni 2021. Ada penurunan sebesar 10,04 persen dibandingkan bulan sama pada 2020. Jika dibandingkan keadaan Mei 2021, jumlah kunjungan wisman Juni 2021 juga mengalami penurunan sebesar 7,71 persen.

Pemerintah tentu saja tidak tinggal diam dengan kondisi seperti ini. Melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah memasukkan sektor pariwisata sebagai satu di antara beberapa sumber devisa yang perlu dibantu pemulihannya. Satu di antara upaya pemulihan itu adalah ikut dilibatkannya generasi milenial untuk membantu mempromosikan sektor pariwisata.

Pelibatan generasi dengan rentang usia di bawah 40 tahun itu tentu bukan tanpa alasan.

Mereka mempunyai ketergantungan terhadap internet yang tinggi, mencapai 93,9 persen. Keseharian mereka diwarnai dengan berselancar di dunia maya, memasuki platform-platform media sosial populer seperti Instagram, Facebook, Whatsapp, dan lainnya. Anak-anak muda ini adalah bagian dari 202 juta rakyat Indonesia yang telah melek internet, dengan 176 juta jiwa di antaranya aktif bermedsos.

Bagi anak-anak muda, medsos telah menjadi tempat untuk mengaktualisasikan diri, eksistensi dan pengakuan terhadap apa yang telah dikerjakan. Tindakan ini disebut sebagai sociomateriality atau kegiatan yang tak bisa dilepaskan dari sesuatu hal berbau teknologi. Misalnya, pemanfaatan gawai atau gadget untuk kepentingan aktualisasi diri.

“Mereka ini senang bereksplorasi, seperti mencari tempat-tempat dengan pemandangan menarik dan masih sedikit dikunjungi. Kemudian mereka akan berswafoto dan mengunggahnya di media sosial,” kata pemerhati komunikasi Henri Subiakto saat menjadi pembicara dalam webinar “Peran Penting Milenial dalam Memajukan Pariwisata di Era Digital” yang digelar Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pada Kamis (12/8).

Pandemi juga telah melahirkan sejumlah ide baru dalam berwisata dengan anak-anak milenial sebagai penggerak utama. Diberlakukannya berbagai kebijakan untuk membatasi pergerakan masyarakat demi mencegah penyebaran virus corona memunculkan beberapa istilah baru dalam menikmati destinasi wisata. Misalnya, berlibur ke tempat-tempat yang tidak jauh dari tempat tinggal, bisa berupa menginap di objek wisata pegunungan, hotel di dalam kota, atau menyambangi lokasi wisata dalam kota yang dilengkapi penginapan. Wisata jenis ini dikenal sebagai staycation dan digandrungi oleh kaum milenial. Sejumlah milenial juga kerap melakukan aktivitas bersepeda bersama hingga ke pinggiran kota sambil menikmati lokasi wisata sekitar atau pusat-pusat kuliner tradisional di sekitar.

“Kegiatan seperti ini sudah tentu ikut membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar. Lewat unggahan dari gawai ke medsos, mereka bisa ikut mempopulerkan ruas-ruas berpemandangan menarik yang mereka lewati. Mereka juga bisa menginformasikan daerah mana saja yang punya tempat jajanan enak dan menarik disinggahi para milenial lainnya,” pungkas Henri.

Sumber: Indonesia.go.id

Sentuhan Milenial Memviralkan Pariwisata



Foto: Shutterstockkatiek

Billyani Tania (Peserta PPSA 23)

Lemhannas RI Adalah Tempat Terbaik Untuk Belajar Dan Mengembangkan Kedisiplinan, Keilmuan, Kejujuran, dan Semangat Nasionalisme



Lemhannas RI memberikan kesempatan bagi semua insan yang memenuhi syarat untuk mengikuti Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA). Peserta PPSA Lemhannas RI dapat berangkat dari berbagai latar belakang, tidak hanya unsur TNI dan Polri, tapi juga bisa berangkat dari unsur tokoh masyarakat bahkan swasta.

Billyani Tania, adalah salah satu peserta dari unsur swasta yang berkesempatan mengenyam pendidikan pada PPSA 23. Bagi Billyani, Lemhannas RI adalah lembaga pendidikan yang sangat vital posisinya bagi nusa dan bangsa. Dalam pelaksanaannya, PPSA mampu memberikan wawasan baru yang luar biasa mengenai perkembangan geopolitik Indonesia dan dunia. Sebuah dasar untuk menunjang posisi dirinya, sebagai warga negara dan warga dunia. “Benar-benar memberi manfaat, dalam hidup berbangsa, bernegara dan berwawasan internasional dengan dasar jiwa nasionalisme yang tinggi” ungkap wanita asal Bangka ini.

Bagi Billyani, pelaksanaan PPSA 23 sudah sangat baik, meski terlaksana pada masa pandemi, Lemhannas RI mampu beradaptasi untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Dengan menerapkan blended learning, yang menggabungkan antara pendidikan tatap muka dan pendidikan daring, adalah sebuah kebijaksanaan yang sangat tepat mengingat kondisi pandemi yang belum selesai.

Namun Billyani juga memberikan sedikit catatan yang diharapkan bisa menjadi sebuah saran yang membangun. Menurutnya, kebanyakan penceramah terlalu sempurna dalam menggambarkan kondisi negara, baginya kebanyakan penceramah selalu menampilkan data yang tanpa kelemahan. Padahal, jika penceramah mau dan bisa menampilkan masalah-masalah yang faktual, diskusi yang terlaksana dipastikan bisa menjadi lebih hidup.

“Yaitu das sollen-nya, dasar hukum yang diinginkan atau idealisnya. das sein ; keadaan yang nyata, walau ada deviasinya diskusinya akan memperoleh hal-hal yang optimal untuk memberi yang terbaik. Kalau semua baik dan sama dengan das sollen, berarti tidak ada lagi yang didiskusikan,” tutur Billyani. Jika saja para penceramah mau sedikit saja menyampaikan masalah-masalah dalam paparannya, menurut Billyani para peserta PPSA yang sebagian besar adalah praktisi yang berpengalaman di berbagai bidang bisa memberikan masukan dan solusi yang optimal.

Wanita yang telah menempuh program doktoral bidang ketahanan nasional ini mengakui bahwa para tutor yang dimiliki Lemhannas RI sangat berwawasan dan berilmu serta berbanding lurus dengan pengalaman yang sangat mumpuni di berbagai bidang. Hal ini adalah modal yang sangat penting untuk menjadikan Lemhannas RI sebagai lembaga think tank dalam memberikan masukan dan kajian untuk digunakan sebagai dasar pembuatan undang-undang dan kebijakan strategis.

Disamping itu, Lemhannas RI diharapkan untuk terus menjadi lembaga yang berguna dalam mendidik para calon pemimpin yang akan mengisi berbagai jabatan strategis. Karena berdasar pada pengalaman Billyani, Lemhannas RI adalah tempat terbaik untuk belajar dan mengembangkan kedisiplinan, keilmuan, kejujuran, dan semangat nasionalisme. Hal ini dibuktikan dengan pengalamannya dalam diskusi-diskusi yang dijalankan selama PPSA 23 yang berani menerima perbedaan, untuk mencapai titik musyawarah dan mufakat agar mendapatkan konklusi yang terbaik. “Tidak ada yang menjadi superhero tapi yang ada super team untuk mencapai tujuan bersama,” ujar Billyani.

Mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang masih menghantui Indonesia, Billyani juga memberikan beberapa tanggapannya yang mungkin bisa

memberikan sudut pandang lain dalam penanganan Covid-19. Menurutnya pelaksanaan PPKM sudah on track dalam tujuan memutus mata rantai penyebaran, meski perubahan istilah ataupun singkatan yang digunakan cukup dianggap membingungkan masyarakat (PSBB menjadi PPKM).

Di sisi lain, Billyani juga berharap pemerintah tetap memperhatikan beberapa hal yang mungkin dialami oleh kebanyakan masyarakat seperti konsekuensi kehilangan pekerjaan saat pelaksanaan PPKM dan mengakibatkan kehilangan penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primer. Hal ini jelas akan menimbulkan masalah dikemudian hari sehingga pemerintah harus menyiapkan solusi secepat-cepatnya.

Dengan tren penurunan kasus positif yang terus menurun Billyani memberikan pandangannya dalam menyikapi tren baik ini. Menurutnya untuk mempertahankan tren ini, pemerintah harus memiliki data yang tepat mengenai angka warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan dan tunjangan, karena dengan penyaluran bantuan yang tepat sasaran dianggap bisa mengurangi mobilitas warga. Tidak kalah penting, semua tunjangan harus disalurkan melalui perbankan, sehingga dapat dideteksi tepat sasaran dan dapat diawasi penyalurannya.

Sarannya yang kedua adalah pemberian PCR test dan swab antigen gratis, bagi warga yang mengalami gejala demam, dan batuk serta memperketat proses tracing bagi orang-orang yang terpapar virus Covid-19. Tapi yang paling penting menurutnya adalah menciptakan kesadaran untuk hidup sehat dan saling menjaga, sebuah langkah awal untuk membentuk lingkungan mental dan spiritual yang sehat. “Semua orang diberi kesadaran prokes (protokol kesehatan) karena bukan takut hukum, tapi kesadaran untuk sehat,” ujar Billyani.

Gallery



Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima audiensi dari Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (PP Bakomubin), Kamis, 1 Juli 2021. Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Bakomubin Dr. H. Ali Mochtar Ngabalin, M.A. didampingi oleh Sekretaris Jenderal Bakomubin Yayan Surahman, S.T, Ketua Bidang Hukum dan HAM Fajri Timur S.H., dan Koordinator Wilayah Jawa, Bali, NTB, NTT Drs. H. M. Asraf Ali.

Audiensi Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia

“Kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kapasitas personel sebagai pendorong transformasi yang mendukung Indonesia melakukan lompatan proses pencapaian aspirasi Roadmap/ Peta Jalan Program Making Indonesia 4.0 dan pembangunan berkelanjutan melalui tindakan kolaboratif dan solusi yang inovatif,” ujar Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo saat membuka kegiatan Pelatihan Kapasitas Personel Lemhannas RI dalam Memasuki Era Industri 4.0 pada Selasa (13/07).

Pembukaan Making Indonesia 4.0 Tahun 2021



Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghuftron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK, secara daring, memberikan ceramah kepada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 pada Jumat (30/7). Ali Ghuftron menyampaikan bahwa dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan pada tahun 2024 harus mencapai 98% dari total penduduk.

Dirut BPJS Kesehatan Memberikan Ceramah kepada Peserta PPSA 23



Kisah kehidupan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dituangkan dalam buku berjudul “Tentara Kok Mikir? Inspirasi Out of The Box Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo” karya Bernada Rurit yang diluncurkan di Lemhannas RI pada Rabu, 25 Agustus 2021. Dalam buku tersebut diceritakan kehidupan Agus Widjojo mulai dari masa kecil, kepribadian dan pertemanannya, pemikiran-pemikirannya, kiprahnya dalam dunia militer, dan persentuhannya dengan masyarakat sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Buku ini juga memberikan ruang sisi humanis, keluarga, serta aktivitas organisasi dari seorang Agus Widjojo.

Peluncuran Buku “Tentara Kok Mikir?”

Menjelang berakhirnya Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), diselenggarakan Penataran Istri/Suami Peserta PPRA 62 Lemhannas RI Tahun 2021 secara Virtual. Penataran tersebut dilaksanakan selama enam hari dimulai Senin, 23 Agustus 2021 sampai dengan Senin, 30 Agustus 2021 dan diikuti oleh 76 orang istri/suami peserta, yang terdiri dari 71 orang istri dan 5 orang suami.



Penataran Istri/Suami PPRA 62



Setelah dibuka pada 26 Januari 2021 dan berjalan selama 7 bulan, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 resmi ditutup pada Selasa, 31 Agustus 2021. Sebanyak 80 orang peserta PPRA 62 dinyatakan lulus dan menerima ijazah. Selama 7 bulan masa pendidikan, seluruh tahapan berjalan dengan lancar, walaupun terdapat keterbatasan karena tidak sesuai dengan kalender pendidikan yang sudah direncanakan dengan adanya pandemi Covid-19

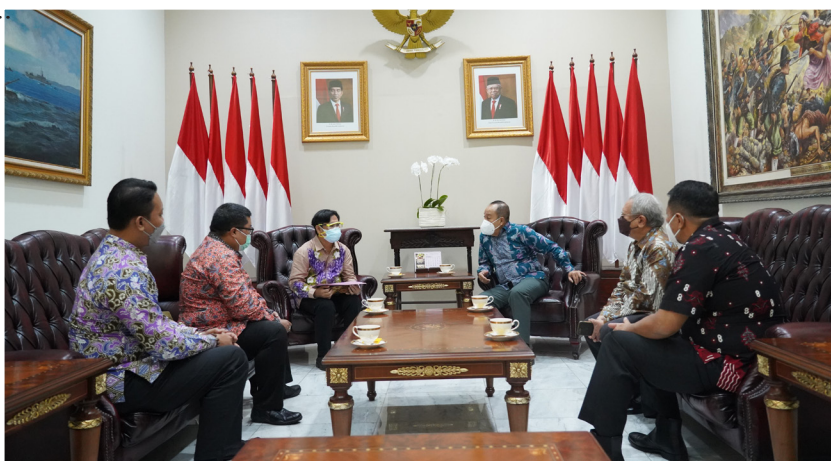
Penutupan PPRA 62



Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melepas 12 pejabat eselon I, II, III, dan VI serta melantik 22 pejabat eselon I, II, III, dan VI pada Selasa, 14 September 2021. Pelantikan dan pelepasan tersebut berdasarkan pada Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor, 101, 127, 129, 130, 131, 136, 137, 146 dan 147 Tahun 2021.

Pelantikan dan Pelepasan Pejabat Eselon, I, II, III dan IV Lemhannas RI

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo didampingi Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si., dan Tenaga Profesional Bidang SKA dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A. menerima audiensi tiga mahasiswa Program Doktor Program Studi Hukum Universitas 17 Agustus Semarang pada Jumat (3/9).



Audiensi Lemhannas RI dengan UNTAG

Persatuan Istri Anggota Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Perista Lemhannas RI) menggelar kegiatan "Understanding You: Makes More Confidence than Before" dengan narasumber Dodi Rustandi dari STIFIn pada Rabu (15/9). Dalam sambutannya, Plt. Ketua Perista Lemhannas RI Lisa Wieko Syofyan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berkaitan dengan program kerja bidang pendidikan Perista Lemhannas RI. "Saya berharap apa yang disampaikan oleh Bapak Dodi Rustandi nantinya akan bermanfaat bagi kita semua," kata Lisa.



Perista Lemhannas RI Selenggarakan Kegiatan Pengembangan Diri

INGAT YA!

SEMUA VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA GRATIS

Semua jenis vaksin yang digunakan di Indonesia telah melalui serangkaian uji klinis dan akan diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa biaya

Program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan pemerintah sejak Januari 2021 diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia

Semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan vaksin COVID-19

Masyarakat kini bisa memantau stok vaksin di daerahnya melalui website vaksin.kemkes.go.id melalui menu stock vaksin

Apabila menemukan pihak-pihak yang meminta bayaran segera laporkan ke **Halo Kemkes 1500567** atau email ke pengaduan.itjen@kemkes.go.id

Sumber data: IndonesiaBaik.id





5M

KUNCI KETAHANAN DIRI



Mencuci Tangan

menggunakan sabun dan air mengalir



Memakai Masker

dengan perlindungan optimal yaitu dengan double masker



Menjaga Jarak

aman 1-5 - 2 m dengan orang lain



Menghindari Kerumunan

karena laju transmisi virus semakin cepat



Mengurangi Mobilitas

lebih baik di rumah saja dan mengurangi kegiatan yang tidak mendesak